



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKjIP) TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

JLN. PEMBANGUNAN NO. 21 PADANG HARAPAN
BENGKULU 38225

TELP. (0736) 22231 FAX : (0736) 21585

email : pt-bengkulu@yahoo.com

**ZONA
INTEGRITAS**





PERNYATAAN TELAH DI REVIU ATAS LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Bengkulu, 25 Februari 2026

Pereviu I

Dr. BAMBANG EKA PUTRA, SH., M.H.

Pereviu II

SUMEDI, S.H., M.H.



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja dalam mencapai visi dan misi pada Tahun Anggaran 2025. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu 2025 mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selama tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029. Dalam LKjIP ini akan dijabarkan Rencana Kinerja dan juga analisis Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025.

Harapan kami LKjIP Pengadilan Tinggi Bengkulu ini dapat berguna sebagai sumber informasi bagi masyarakat atas tanggung jawab yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan, dan juga sebagai pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu di masa yang akan datang.

Bengkulu, 26 Februari 2026

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu



Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Ringkasan Eksekutif

Sepanjang tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bengkulu secara umum telah berhasil melaksanakan misi yang diemban dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Bengkulu ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Bengkulu menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis, dan sasaran tersebut diukur menggunakan target kinerja pada 12 (dua belas) indikator kinerja.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa sasaran strategis yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2025, Ketiga sasaran strategis yang telah ditetapkan berhasil dilaksanakan dengan cukup baik, yaitu :

1. Sasaran terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern.
2. Sasaran meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik.
3. Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Secara keseluruhan, rata-rata pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu sebesar **103,74%**. Rincian pencapaian kinerja masing-masing indikator tiap sasaran strategis tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.
Sasaran Strategis 1: Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100 %	100%
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%	100%	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100 %	100%
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	98%	90 %	108,89%
Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	77,47%	70 %	110,67%
Rata-rata Capaian Kinerja			103,91%

Tabel 2.
Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,99	3,90	102,31%
Rata-rata Capaian Kinerja			102,31%

Tabel 3.
Sasaran Strategis 3: Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77,10	71	108,59%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	98,18	93	105,57%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	94,24	93	101,33%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	105,26%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85	80	106,25%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,4	3,3	103,03%
Rata-rata Capaian Kinerja			105,00%



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	→	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	→	ii
KATA PENGANTAR	→	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	→	iv
DAFTAR ISI	→	v
DAFTAR TABEL	→	vi
DAFTAR GRAFIK	→	vii
DAFTAR GAMBAR	→	viii

BAB I PENDAHULUAN **1**

Latar Belakang	→	2
Tugas Pokok dan Fungsi	→	4
Struktur Organisasi	→	6
Isu Strategis	→	8
Sistematika Penyajian	→	12

BAB II PERENCANAAN KINERJA **14**

Rencana Strategis 2025-2029	→	14
Rencana Kinerja Tahun 2025	→	18
Perjanjian Kinerja Tahun 2025	→	19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA **22**

Capaian Kinerja Organisasi	→	22
Realisasi Anggaran	→	61
Tindak Lanjut LHE AKIP Tahun 2024	→	65

BAB IV PENUTUP **69**

Kesimpulan	→	69
Rekomendasi	→	69

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sasaran Strategis 1	iv
Tabel 2 Sasaran Strategis 2	iv
Tabel 3 Sasaran Strategis 3	iv
Tabel 4 Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	2
Tabel 5 Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	16
Tabel 6 Rencana Kinerja Tahun 2025	18
Tabel 7 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	19
Tabel 8 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	20
Tabel 9 Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi	22
Tabel 10 Capaian Sasaran Terwujudnya Peradilan Yang Efektif, Transparan Akuntabel, Responsif dan Modern	23
Tabel 11 Persentase Perkara Perdata Yang diselesaikan Tepat Waktu	24
Tabel 12 Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju	27
Tabel 13 Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	30
Tabel 14 Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court	33
Tabel 15 Persentase Perkara Pidana Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Berpadu	36
Tabel 16 Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	39
Tabel 17 Index Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	40
Tabel 18 Capaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	43
Tabel 19 Persentase Capaian Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan	44
Tabel 20 Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	47
Tabel 21 Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	50
Tabel 22 Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	53
Tabel 23 Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	55
Tabel 24 Realisasi Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	58
Tabel 25 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2025	61
Tabel 26 Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2025	62
Tabel 27 Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025	63
Tabel 28 Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana	63
Tabel 29 Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana	63
Tabel 30 Laporan Keadaan Perkada Perdata Tahun 2025	63
Table 31 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2025	63
Tabel 32 Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2025 Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja	64
Tabel 33 Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu	65



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	23
Grafik 2. Persentase Perkara Perdata Yang Diselesaikan Tepat Waktu	24
Grafik 3. Persentase Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju	27
Grafik 4. Persentase Capaian Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan	30
Grafik 5. Persentase Realisasi Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court	33
Grafik 6. Persentase Capaian Perkara Pidana Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Berpadu	36
Grafik 7. Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Kenyakinan dan Kepercayaan Publik	39
Grafik 8. Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan	40
Grafik 9. Capaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional	43
Grafik 10. Capaian Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan	44
Grafik 11. Realisasi Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	47
Grafik 12. Realisasi Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	50
Grafik 13. Realisasi Nilai KPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01	53
Grafik 14. Realisasi Nilai KPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03	56
Grafik 15. Realisasi Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	58
Grafik 16. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2025	62
Grafik 17. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2025	62



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bengkulu	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu	6
Gambar 3. Rincian Biaya Perkaya di SIPP	64



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB I PENDAHULUAN

ZONA
INTEGRITAS
NO KORUPSI





BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*). berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) bahwa pemerintahan yang akuntabel dapat terlihat dimulai dari kualitasnya sistem perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*), terukurnya kualitas capaian kinerja, dan adanya sistem evaluasi kinerja internal.

Sebagai wujud penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan akuntabel serta untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor tanggal tentang, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu atas penggunaan anggaran tahun 2025. Laporan Kinerja Tahun 2025 ini telah membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2025 dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 serta Capaian Kinerja.

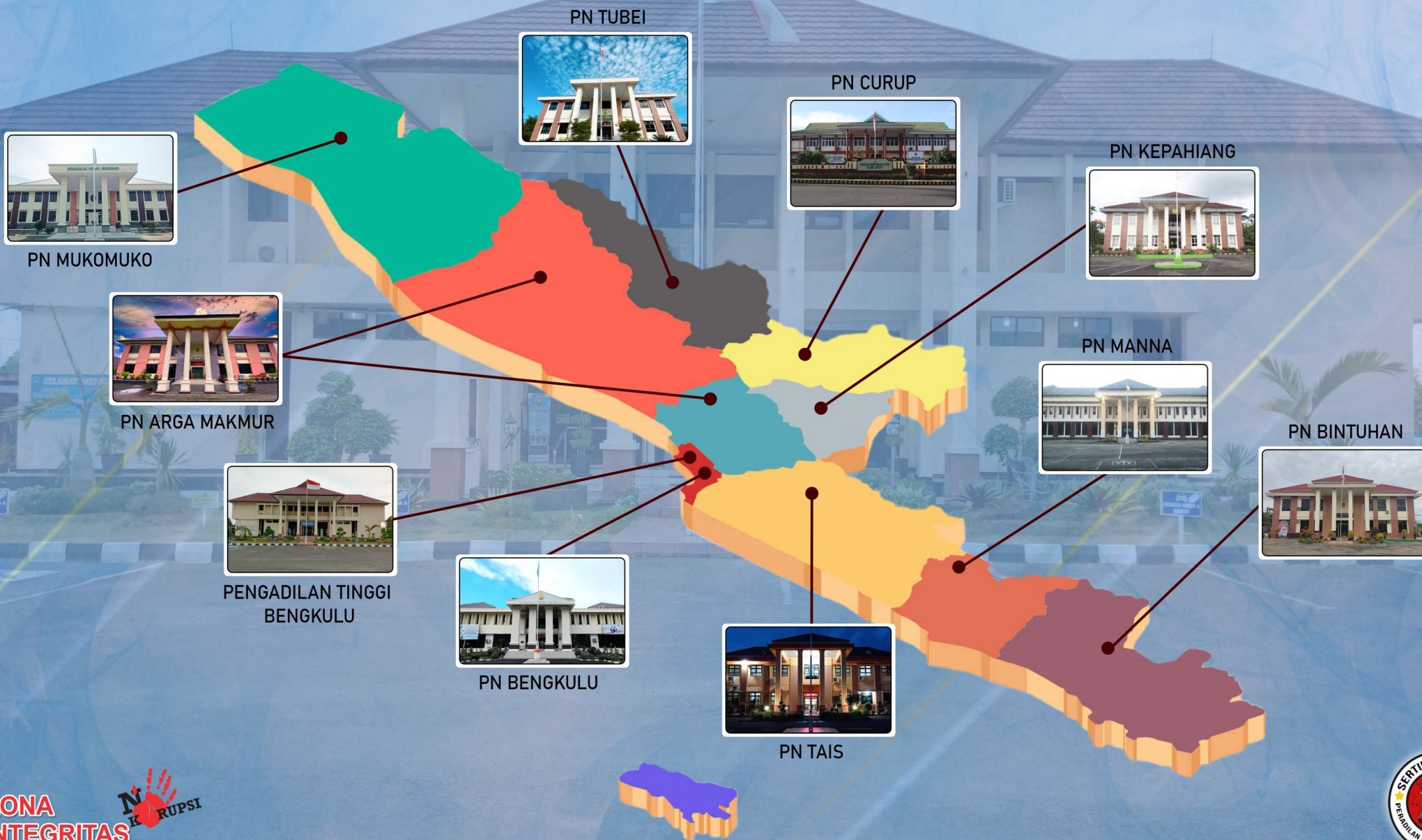
Pengadilan Tinggi Bengkulu merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 9 (sembilan) Pengadilan Negeri di wilayah hukum

Tabel 4.
Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sewilayah Hukum
Pengadilan Tinggi Bengkulu

NO	NAMA PENGADILAN	LOKASI	WILAYAH HUKUM	KELAS
1.	PENGADILAN NEGERI BENGKULU	Bengkulu	Kota Bengkulu	Kelas 1A
2.	PENGADILAN NEGERI CURUP	Curup	Kabupaten Rejang Lebong	Kelas 1B
3.	PENGADILAN NEGERI MANNA	Manna	Kabupaten Bengkulu Selatan	Kelas II
4.	PENGADILAN NEGERI ARGAMAKMUR	Argamakmur	Kabupaten Bengkulu Utara Kabupaten Bengkulu Tengah	Kelas II
5.	PENGADILAN NEGERI BINTUHAN	Bintuhan	Kabupaten Kaur	Kelas II
6.	PENGADILAN NEGERI TAIS	Tais	Kabupaten Seluma	Kelas II
7.	PENGADILAN NEGERI TUBEI	Tubei	Kabupaten Lebong	Kelas II
8.	PENGADILAN NEGERI KEPAHIANG	Kepahiang	Kabupaten Kepahiang	Kelas II
9.	PENGADILAN NEGERI MUKOMUKO	Mukomuko	Kabupaten Mukomuko	Kelas II



PETA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU



B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku salah satu kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dalam pasal 51 yang menyatakan :

1. Pengadilan Tinggi bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan perkara perdata di tingkat banding. (Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
2. Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta. (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).
3. Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-Undang. (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009).

Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki fungsi sebagai berikut:



Fungsi Mengadili

Yaitu memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi.



Fungsi Pembinaan

Yaitu memberikan pengarahan di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi, peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.



Fungsi Pengawasan

Yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Pejabat Struktural dan Pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan tingkat pertama agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara dan administrasi umum.



Fungsi Nasehat

Yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.



Fungsi Administrasi

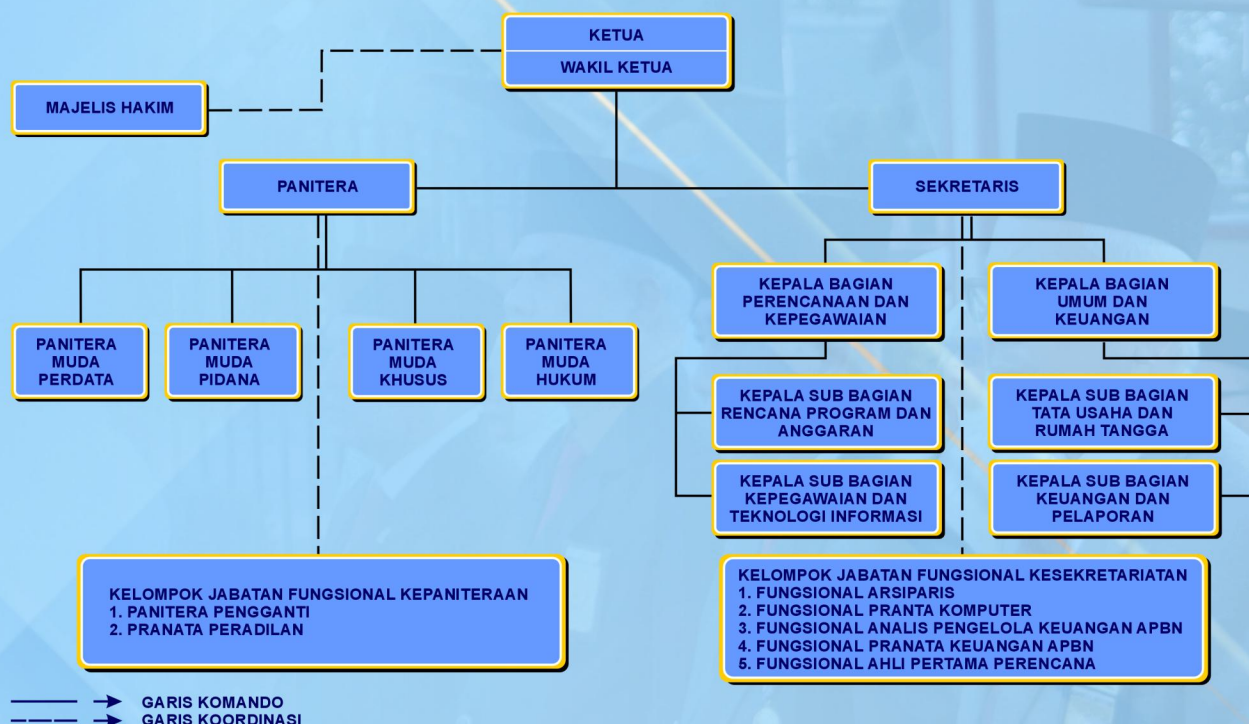
Yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Bengkulu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 7 Oktober 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, secara ringkas dituangkan pada bagan berikut :



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI BENGKULU



KETUA PENGADILAN TINGGI

Ketua Pengadilan Tinggi sebagai pimpinan Pengadilan Tinggi bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi pada Pengadilan Tinggi.

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI

Wakil Ketua Pengadilan Tinggi membantu Ketua Pengadilan Tinggi melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengadilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama.

HAKIM TINGGI

Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan Tinggi.

PANITERA

Panitera Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Terdiri atas:

- 1. Panitera Muda Perdata**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang perdata
- 2. Panitera Muda Pidana**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
- 3. Panitera Muda Pidana Khusus Tipikor**
Melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana
- 4. Panitera Muda Hukum**
Melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, hubungan masyarakat, penataan arsip perkara serta pelaporan.

PANITERA PENGGANTI

Membantu Hakim Tinggi dalam persidangan perkara perdata, pidana dan perkara khusus serta melaporkan kegiatan persidangan tersebut kepada Panitera Muda yang bersangkutan.

SEKRETARIS

Sekretaris Pengadilan Tinggi mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana. Kesekretariatan Pengadilan Tinggi terdiri atas:

A. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian

Mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.

B. Bagian Umum dan Keuangan

Melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, hubungan masyarakat, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.

BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN

Terdiri atas :

1. Subbag Rencana Program dan Anggaran

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

2. Subbag Kepegawaian Teknologi Informasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi serta penyusunan laporan.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Terdiri atas :

1. Subbag Tata Usaha dan Rumah Tangga

Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan surat-surat, penyusunan arsip dan pembinaan administrasi tata usaha dan rumah tangga, keprotokolan, perpustakaan serta hubungan masyarakat.

2. Subbag Keuangan dan Pelaporan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara dan pelaporan keuangan serta pelaksanaan pemantauan serta penyusunan laporan.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Terdiri atas :

1. Pranata Komputer

Mempunyai tugas menganalisis informasi, perancangan sistem informasi, perancangan sistem komputer, perancangan dan pengembangan database.

2. Arsiparis

Mempunyai tugas melakukan identifikasi, verifikasi dan penyusunan daftar salinan autentik dan naskah asli arsip terjaga.

3. Pranata Keuangan APBN

4. Analisis SDM Aparatus

5. Pengelola Barang dan Jasa

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL PPPK

Terdiri atas :

1. Perencana

2. Arsiparis

KELOMPOK PELAKSANA

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan urusan dari masing-masing subbagian pelaksana tersebut ditempatkan.



D. ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis sepanjang Tahun 2024 terkait dengan kemajuan atau pun perubahan di lembaga peradilan umum khususnya pada Pengadilan Tinggi Bengkulu antara lain :



PENANDATANGANAN PAKTA INTEGRITAS DAN KOMITMEN BERSAMA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TAHUN 2025

Penandatanganan Pakta Integritas dan Komitmen Bersama Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 oleh Pimpinan, Seluruh Hakim Tinggi, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta Pelaksana Pengadilan Tinggi Bengkulu yang bertempat di Ruang Soebekti Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2025



PERTEMUAN RUTIN DAN SARASEHAN INTERAKTIF (PERISAI) EPISODE 3 OLEH DIRJEN BADILUM

Pimpinan dan Para Hakim Tinggi mengikuti Pertemuan Rutin dan Sarasehan Interaktif (Perisai) Episode 3 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan bertemakan tentang "Kinerja Berkualitas dengan Integritas" pada tanggal 20 Januari 2025. Perisai Badilum dilaksanakan untuk meningkatkan budaya berdiskusi, kinerja berkualitas, integritas, permasalahan teknis dilapangan dan mempererat hubungan antar aparatur peradilan di seluruh Indonesia.



SOSIALISASI KUHP, E-COURT DAN E-LITIGASI SERTA ADMINISTRASI PERKARA DAN SIDANG ELEKTRONIK OLEH KETUA PT BENGKULU

Tanggal 03 Februari 2025 Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menyampaikan sosialisasi mengenai KUHP, e-Court, dan e-Litigasi serta Administrasi Perkara dan Sidang Elektronik kepada pada Advokat dan enaga Teknis Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan harapan hukumdi Indonesia akan menjadi lebih ditegakkan dengan baik.



SIDANG ISTIMEWA LAPORAN TAHUNAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Dr. Lilik Mulyadi, S.H., M.H. menghadiri kegiatan Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada Tanggal 19 Februari 2025. sebagai bentuk pertanggungjawaban Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan dibawahnya sebagai Lembaga Yudikatif.



SOSIALISASI ASPEK KRUSIAL, IMPLEMENTATIF DAN KEBARUAN UU NOMOR 1 TAHUN 2023 DARI PERSPEKTIF HAKIM OLEH KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pada Tanggal 12 Maret 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Tais menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bertema "Aspek Krusial, Implementatif dan Kebaruan UU Nomor 1 Tahun 2023 dari Perspektif Hakim". Dari sosialisasi tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu menyampaikan betapa pentingnya bagi kita semua, terkhusus Warga Peradilan untuk memahami UU Nomor 1 Tahun 2023.



PENYAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU BAPAK Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. OLEH KELUARGA BESAR PT BENGKULU

Rabu, 11 Juni 2025 Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bengkulu menyambut kedatangan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum, pasca Pelantikan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. pada tanggal 05 Juni 2025 di Jakarta, Gedung Mahkamah Agung Republik Indonesia.



PELAKSANAAN SERTIFIKASI MUTU PENGADILAN UNGGUL DAN TANGGUH (AMPUH) OLEH DITJEN BADILUM DI PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Ditjen Badilum melaksanakan Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) di Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tanggal 19 Juni 2025. Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. membuka pelaksanaan Asesmen Sertifikasi Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (Ampuh) bersama kepala Subdirektorat Data dan Informasi Ditjen Badilum Mahkamah Agung Republik Indonesia Bapak Saenal Akbar, S.H., M.H.



KUNJUNGAN KERJA WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK BIDANG NON YUDISIAL INDONESIA YM H. SUHARTO, S.H., M.Hum

Kunjungan Kerja Yang Mulai H. Suharto, S.H., M.Hum Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Republik Indonesia ke Pengadilan Tinggi Bengkulu yang disambut oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum beserta Keluarga Besar Pengadilan Tinggi Bengkulu pada Tanggal 24 Juni 2025.



RAPAT PERSIAPAN EVALUASI DOKUMEN USULAN PREDIKAT WBK PENGADILAN TINGGI BENGKULU DENGAN DITJEN BADILUM

Pengadilan Tinggi Bengkulu sebagai salah satu Calon Unit Kerja yang diusulkan untuk meraih predikat Wilayah Bebas Koprusi (WBK) mengikuti rapat seara daring dengan Ditjen Badilum yang bertujuan untuk persiapan evaluasi dokumen usulan predika WBK pada tanggal 25 Juni 2025



SOSIALISASI SK KMA NO. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 PENGADILAN NEGERI SEWILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI BENGKULU SECARA DARING

Pada tanggal 10 Juli 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu melaksanakan Sosialisasi SK KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Bapak Drs. Arifin, S.H., M.Hum. yang didampingi oleh Bapak Dr. Bambang Ekaputra, S.H., M.H. sebagai Narasumber pada sosialisasi tersebut.



REKONSILIASI DATA ASSET DAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM KOORDINATOR WILAYAH BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu bersama satuan kerja di wilayah hukum Bengkulu mengikuti kegiatan Rekonsiliasi Data Aset dan Keuangan Ditjen Badan Peradilan Umum yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu selaku Koordinator Wilayah 03 pada tanggal 17 Juli 2025.



UPACARA MEMPERINGATI DIRGAHAYU KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-80 PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Pengadilan Tinggi Bengkulu melaksanakan upacara memperingati Dirgahayu Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80 pada tanggal 17 Agustus 2025 untuk mengenang jasa para Pahlawan Kemerdekaan yang telah memberikan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Bab I Pendahuluan,

Pada bab ini disajikan secara ringkas tentang Latar Belakang, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi, Isu Strategis dan Sistematika Penyajian;

Bab II Perencanaan Kinerja,

Pada bab ini menjelaskan secara ringkas tentang Perencanaan Strategis 2025-2026, Rencana Kinerja Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;

Bab III Akuntabilitas Kinerja,

Pada bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi beserta analisa nya dan menguraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;

Bab IV Penutup,

Pada bab ini disajikan kesimpulan secara umum atas Capaian Kinerja Organisasi serta langkah-langkah yang akan diambil di masa yang akan datang dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

ZONA
INTEGRITAS
NO KORUPSI





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025-2029 merupakan pernyataan komitmen bersama jangka 5 tahun mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya. Hal ini bertujuan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan akuntabilitas kinerja seluruh Hakim dan Pegawai di lingkungan Pengadilan Tinggi Bengkulu melalui perencanaan yang efektif, terarah dan pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil (*result oriented*) penyusunan laporan, pengendalian, serta evaluasi kegiatan guna meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya secara berkesinambungan.

Pengadilan Tinggi Bengkulu menyusun Rencana Strategis 2025-2029 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Mahkamah Agung RI, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan Misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

1. VISI

Visi yang ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN TINGGI BENGKULU YANG AGUNG”

Visi ini mencerminkan cita-cita dan harapan Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menjadikan Pengadilan Tinggi Bengkulu lembaga peradilan yang dihormati dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- Menjaga kemandirian badan peradilan.
- Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan.
- Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.

3. TUJUAN

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut :

- a. Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan.
- b. Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun. Hasil reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025 sampai dengan 2029, sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel Responsif dan Modern
Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah :
 - 1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu;
 - 2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju;
 - 3) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan;
 - 4) Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court;
 - 5) Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu;
- b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik;
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan;
- c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional;
 - 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan
 - 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01);
 - 3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03);
 - 4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01);
 - 5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03);
 - 6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan;

Indikator Kinerja Utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Bengkulu telah menetapkan Indikator Kinerja dan Indikator Kinerja tersebut telah direviu untuk mempertajam Sasaran Strategis. Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama digambarkan pada tabel berikut:



Tabel 5.
Hubungan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian Setara dan Berkeadilan	1. Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase Penyelesaian perkara tepat waktu	Perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan
			b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	Perbandingan antara jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus
			c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	Perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi
			d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	Perbandingan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dengan jumlah perkara perdata tingkat banding yang diajukan
			e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	Perbandingan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dengan jumlah perkara pidana tingkat banding yang diajukan
		2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan
2.	Mewujudkan Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) yang terdiri dari kompetensi, kinerja, kualifikasi, dan disiplin
			b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
			c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
			d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Nilai kinerja perencanaan anggaran yaitu Efektifitas dengan nilai 75% dan Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker yang merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
			e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	Nilai kinerja perencanaan anggaran yaitu Efektifitas dengan nilai 75% dan Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker yang merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan
			f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	IPA adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara, Nilai IPA merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan



5. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Pengadilan Tinggi Bengkulu menggunakan program dan kegiatan yang sesuai dengan program dan kegiatan Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut:

a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Indikator Kegiatan ini adalah : Perkara peradilan umum yang diselesaikan di Tingkat Pertama dan Banding yang tepat waktu.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum mendukung capaian Indikator Kinerja :

- 1) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyelesaian perkara perdata tepat waktu pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan umum
- 2) Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Umum di Tingkat Banding yang diselesaikan tepat waktu.
- 3) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan umum.
- 4) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi penyedia atau pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan umum.
- 5) Jumlah Pelaksanaan Koordinasi pengiriman petikan atau pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan umum
- 6) Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan di lingkungan peradilan umum.
- 7) Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara perdata yang menggunakan e-Court.
- 8) Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu).
- 9) Jumlah Pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu)
- 10) Jumlah pelaksanaan koordinasi upaya hukum banding perkara perdata di lingkungan yang menggunakan e-Court

b. Program Dukungan Manajemen

Program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu :

- 1) Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Indikator Kegiatan ini adalah: Penyelenggaraan operasional perkantoran dan non operasional satker daerah.
- 2) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung. Indikator Kegiatan ini adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana

Program Dukungan Manajemen mendukung capaian Indikator Kinerja :

- 1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN).
- 2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA).
- 3) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA).
- 4) Kualitas Pelayanan Informasi Publik.



B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025. Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar dalam menetapkan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau disebut juga dengan Perjanjian Kinerja.

Tabel 6.
Rencana Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu 100% Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju 100% Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan 100% Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court 90% Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu 70 %		Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan di Tingkat Banding	142 perkara	Rp. 159.494.000,-
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	Penyelenggaraan Operasional Perkantoran dan Non Operasional Satker Daerah	1 Layanan	Rp. 20.085.466.000,-
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan 71 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan 93 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan 93 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 95 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 80 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan 3,30						



C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen Perjanjian Kinerja sebagai bentuk komitmen pimpinan atas target kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 7.
Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara pidana khusus yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	25%
		Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%
		Persentase salinan putusan pidana khusus yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	100%

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen Administrasi
Kesekretariatan Urusan Administrasi
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

ANGGARAN

- Rp. 22.035.059.000
- Rp. 214.494.000



Pengadilan Tinggi Bengkulu telah Menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 pada Tanggal 2 Januari 2025. Namun dengan adanya Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 27101/SEK//SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di lingkungan Mahkamah Agung RI tahun 2025-2029 pada Tanggal 31 Oktober 2025, maka Pengadilan Tinggi Bengkulu perlu menetapkan Revisi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Adapun Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu adalah sebagai berikut:

Tabel 8.
Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	90%
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	70%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesiional Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	93
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (03)	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	80
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,3

KEGIATAN

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

ANGGARAN

Rp. 25.085.466.000
Rp. 159.494.000



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

ZONA
INTEGRITAS
NO KORUPSI



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun pertama dari Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025-2029. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara Realisasi dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga dapat terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan telah tercapai atau tidak. Dari hasil pengukuran capaian kinerja tersebut, diperoleh data bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025 adalah sebesar **103,74 %**. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-masing indikator kinerja utama, sebagai berikut :

Tabel 9. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100 %	100 %	100 %
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100 %	100 %	100 %
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	98 %	90 %	108,89 %
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	77,47 %	70 %	110,67 %
Rata-rata Capaian Sasaran 1					103,91 %
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Index Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,99	3,90	102,31 %
Rata-rata Capaian Sasaran 2					102,31 %
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	77,10	71	108,59 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	98,18	93	105,57 %
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94,24	93	101,33 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	100	95	105,26 %
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (03)	85	80	106,25 %
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,4	3,3	103,03 %
Rata-rata Capaian Sasaran 3					105,00 %

EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

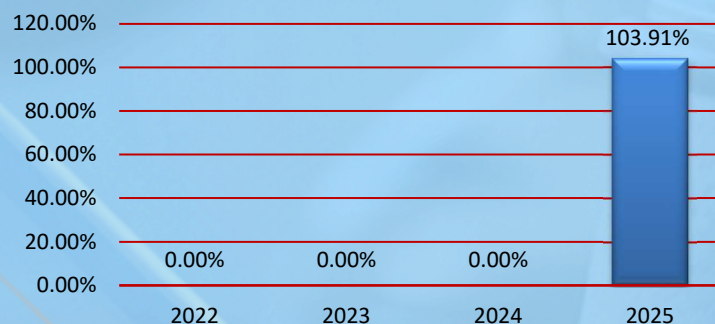
SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN

Tabel 10. Capaian Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100%	100%
b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%	100%	100%	100%
c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%	100%	100%	100%
d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	n/a	n/a	n/a	108,89%
e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	n/a	n/a	n/a	110,67%
Capaian Sasaran I	n/a	n/a	n/a	103,91 %

Grafik 1. Capaian Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern



Sasaran strategis Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern dimaksudkan untuk menggambarkan upaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang tepat sasaran, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, cepat tanggap dan berbasis kepada teknologi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mengukur tingkat ketepatan waktu penyelesaian perkara, ketepatan waktu pengiriman salinan putusan, kepatuhan dalam mengunggah putusan pada Direktori Putusan, serta upaya peningkatan kualitas layanan secara elektronik berbasis Teknologi Informasi. Pada sasaran ini terdapat 5 (lima) indikator kinerja yang diukur.

Data pada tabel 10 dan grafik 1 menunjukkan bahwa Capaian Sasaran Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern pada tahun 2025 sebesar 103,91%. Secara umum dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu selalu terus berupaya melaksanakan penyelenggaraan peradilan yang tepat sasaran, terbuka, dapat dipertanggungjawabkan sehingga mampu meningkatkan capaian sasaran strategis yang pertama yaitu Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern.

SASARAN 1 INDIKATOR 1

PERSENTASE PENYELESAIAN PERKARA SECARA TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Jumlah penyelesaian perkara tepat waktu mengacu kepada Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014. Dimana disebutkan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan. Ketentuan tersebut termasuk penyelesaian minutes. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Secara umum capaian indikator ini sangat baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pada tahun 2025 sebanyak total 438 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

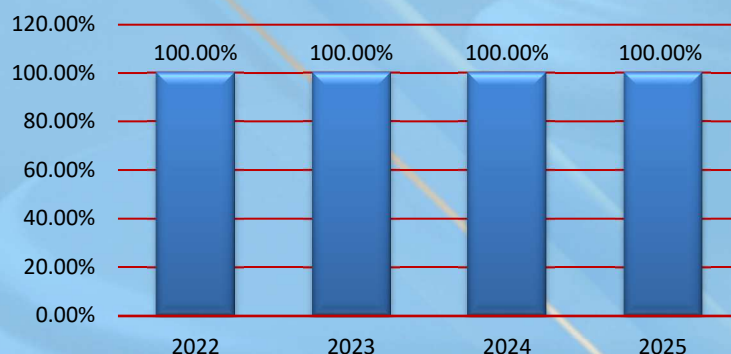
- ✓ Perkara Perdata : 46 Perkara
- ✓ Perkara Pidana Biasa : 352 Perkara
- ✓ Perkara Pidana Anak : 18 Perkara
- ✓ Perkara Pidana Tipikor : 22 Perkara

Selama tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 438 perkara dan perkara yang diputus tepat waktu juga sebanyak 438 perkara. Dengan demikian tahun 2025 indikator persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu mencapai target 100%.

Tabel 11. Persentase Penyelesaian Perkara Secara Tepat Waktu

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	438	438	100%	100%	100%
2024	430	430	100%	100%	100%
2023	275	275	100%	100%	100%
2022	200	200	100%	100%	100%

Grafik 2. Persentase Capaian Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2022, 2023 dan 2024 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Benchmark Standar Nasional yaitu sebesar 96,46%, dan juga lebih tinggi dari pada rata-rata realisasi Standar Nasional yaitu sebesar 99,78%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 3,54% dan 0,22%.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Peningkatan Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Maksimal 1,5 Bulan, One Day Minute dan One Day Published di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/KPT.W8-U/PS.03/I/2025;
- Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025;

- d. SOP Penyelesaian Perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran yang mendukung indikator ini adalah Rp.23.825.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.412.959.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,73%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.825.963.000 \times 1,00) - (23.412.959.313))}{\sum_{i=1}^n (23.825.963.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 1,73\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara secara tepat waktu di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding, Minutasi dan juga Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara)

SASARAN 1 INDIKATOR 2

PERSENTASE PENGIRIMAN SALINAN PUTUSAN TEPAT WAKTU OLEH PENGADILAN TINGKAT BANDING KEPADA PENGADILAN PENGAJU

Indikator kinerja persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah perbandingan jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu berbanding dengan jumlah perkara yang diputus. Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/pihak ketiga dengan penjelasan sebagai berikut :

- Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan)
- Kinerja pengiriman salinan putusan melalui pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju.

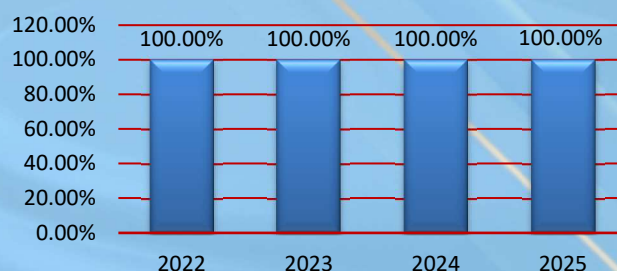
Jangka waktu pengiriman salinan putusan mengacu kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, yang menyebutkan bahwa pengadilan tingkat banding wajib mengirimkan salinan putusan kepada Pengadilan Negeri pengaju untuk diberitahukan kepada para pihak.

Secara umum capaian indikator ini sangat baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pada tahun 2025 adalah sebanyak 438 perkara, selama tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil memutus sebanyak 438 perkara dan salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju secara tepat waktu juga sebanyak 438 perkara. Dengan demikian tahun 2025 indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju mampu mencapai target 100%.

Tabel 12. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju

TAHUN	PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	PERKARA YANG TELAH DISELESAIKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	438	438	100%	100%	100%
2024	430	430	100%	100%	100%
2023	275	275	100%	100%	100%
2022	200	200	100%	100%	100%

Grafik 3. Persentase Capaian Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2022, 2023 dan 2024 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini selalu berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara-perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2024 adalah sebesar 100%, sama dengan target maupun realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai Target dan Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 0%.

*Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Peningkatan Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Maksimal 1,5 Bulan, One Day Minute dan One Day Published di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/KPT.W8-U/PS.03/I/2025;
- Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PT Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025;

- d. SOP Penyelesaian Perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran yang mendukung indikator ini adalah Rp.23.825.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.412.959.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,73%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.825.963.000 \times 1,00) - (23.412.959.313))}{\sum_{i=1}^n (23.825.963.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 1,73\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding, Minutasi dan juga Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara)

SASARAN 1 INDIKATOR 3

PERSENTASE PUTUSAN PENGADILAN YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN

Indikator kinerja persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah perbandingan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Dengan berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara di minutasi.

Secara umum capaian kinerja indikator ini sangat baik karena dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Beban perkara pada tahun 2025 sebanyak total 438 perkara, dengan perincian sebagai berikut :

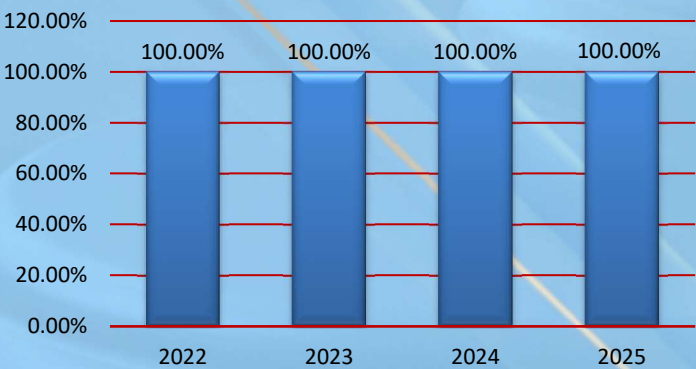
- 1. Perkara Perdata : 46 Perkara
- 2. Perkara Pidana Biasa : 352 Perkara
- 3. Perkara Pidana Anak : 18 Perkara
- 4. Perkara Pidana Tipikor : 22 Perkara

Selama tahun 2025 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melaksanakan proses penyelesaian perkara hingga tahap Minutasi sejumlah total 438 putusan, dan seluruh putusan tersebut juga berhasil diunggah pada Direktori Putusan. Dengan demikian pada tahun 2025 ini indikator persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan mampu mencapai target 100%.

Tabel 13. Persentase Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan

TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIUNGGAH PADA DIREKTORI PUTUSAN	JUMLAH PUTUSAN YANG TELAH DI MINUTASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	438	438	100%	100%	100%
2024	430	430	100%	100%	100%
2023	275	275	100%	100%	100%
2022	200	200	100%	100%	100%

Grafik 4. Persentase Capaian Putusan Pengadilan Yang Diunggah Pada Direktori Putusan



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah sebesar 100%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 juga 100%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2022, 2023 dan 2024 yang juga berhasil mencapai target 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memutus semua perkara yang masuk secara tepat waktu.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 100% pada Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 100%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 90,11% dan sama dengan realisasi nasional sebesar 100%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Target Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 9,89%.

***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan :

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menerapkan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa proses penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan;
- Peningkatan Upaya Percepatan Penyelesaian Perkara Maksimal 1,5 Bulan, One Day Minute dan One Day Published di Pengadilan Tinggi Bengkulu dengan mempedomani Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 92/KPT.W8-U/PS.03/I/2025;
- Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PT Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025;

- d. SOP Penyelesaian Perkara telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan;
- e. Atasan langsung rutin dalam melakukan monitoring dan evaluasi atas SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) untuk melihat perkara mana yang sudah melebihi jangka waktu penyelesaian perkara. Hal ini dapat terlihat pada Aplikasi SIPP, sudah berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara dan di Monev juga setiap pelaksanaan rapat bulanan oleh hakim pengawas SIPP serta Pimpinan Pengadilan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan adalah 100% dengan target 100% dan realisasi 100%. Pagu anggaran yang mendukung indikator ini adalah Rp.23.825.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.412.959.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 1,73%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.825.963.000 \times 1,00) - (23.412.959.313))}{\sum_{i=1}^n (23.825.963.000 \times 1,00)} \times 100\%$$
$$E = 1,73\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan di tahun 2025 adalah sebesar 100%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding dan Minutasi. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara).

SASARAN 1 INDIKATOR 4

PERSENTASE PERKARA PERDATA PADA TINGKAT BANDING YANG MENGGUNAKAN E-COURT

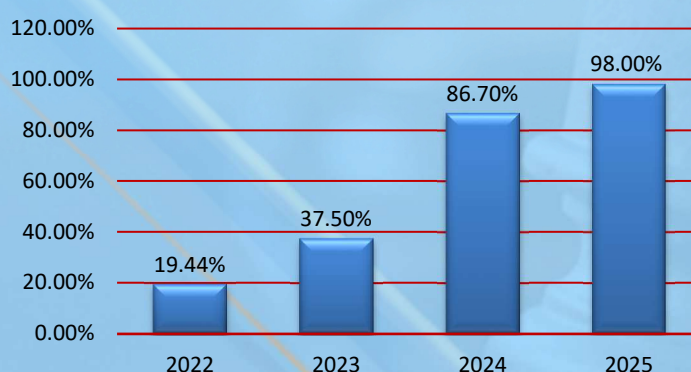
Indikator kinerja Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court adalah perbandingan jumlah perkara Perdata tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court dengan Jumlah Perkara Perdata tingkat banding yang diajukan. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court pada Tahun 2025 mencapai 108,89%.

Tabel 14. Persentase Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court

TAHUN	JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-COURT	JUMLAH PERKARA PERDATA TINGKAT BANDING YANG DIAJUKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	49	50	98,00%	90%	108,89 %
2024	26	30	86,66%	n/a	n/a
2023	15	40	37,50%	n/a	n/a
2022	7	36	19,44%	n/a	n/a

Grafik 5 Persentase Realisasi Perkara Perdata Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Court



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court adalah sebesar 90%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 98%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai dan melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
Jika dilihat pada tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terus terjadi peningkatan pada persentase realisasi perkara perdata yang diajukan banding dengan menggunakan e-Court. Pada tahun 2022 realisasi hanya 19,44%, meningkat menjadi 37,50% di tahun 2023 dan 86,66% di tahun 2024. Sedangkan di tahun 2025 ini realisasi mencapai 98%, hanya 1 dari total 50 perkara perdata yang tidak bisa diajukan menggunakan e-Court. Hal ini disebabkan karena jenis perkara yang diajukan adalah perkara perlawanan yang belum diakomodasi oleh Aplikasi e-Court.
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 90% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 98%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 98%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan target kinerja pada Benchmark Standar Nasional yaitu sebesar 95,76% dan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja Standar Nasional yaitu sebesar 98,94%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu telah berhasil melampaui Benchmark Target Kinerja Nasional Tahun 2025 dengan selisih sebesar 2,24%.

***Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court adalah:

- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menghasilkan putusan hukum yang berkualitas yaitu putusan yang memenuhi kriteria kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*purposiveness*);
- Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PT Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025;
- SOP Penyelesaian Perkara Perdata telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur

Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya peningkatan kinerja adalah :

1. Terkait 1 perkara yang tidak bisa diajukan menggunakan e-Court, hal tersebut telah dikoordinasikan kepada Tim IT Dirjen Badilum MARI selaku pihak pengembang aplikasi tersebut.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court adalah 108,89% dengan target 90% dan realisasi 98%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.746.469.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.335.794.813,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,75%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.746.469.000 \times 1,08) - (23.335.794.813))}{\sum_{i=1}^n (23.746.469.000 \times 1,08)} \times 100\%$$
$$E = 9,75\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

*Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court di tahun 2025 adalah sebesar 108,89%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Umum yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Rapat Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara Perdata.

Selama tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melaksanakan kegiatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dengan mengundang para stakeholder dari instansi pemerintahan seperti Kejaksaan Tinggi Bengkulu, Kepolisian Daerah Bengkulu, Kejaksaan Negeri Bengkulu, Badan Pertanahan Bengkulu, Kantor Pos Wilayah Bengkulu serta para Hakim, Panitera, Jurusita PN sewilayah Bengkulu. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Perdata).

SASARAN 1 INDIKATOR 5

PERSENTASE PERKARA PIDANA PADA TINGKAT BANDING YANG MENGGUNAKAN E-BERPADU

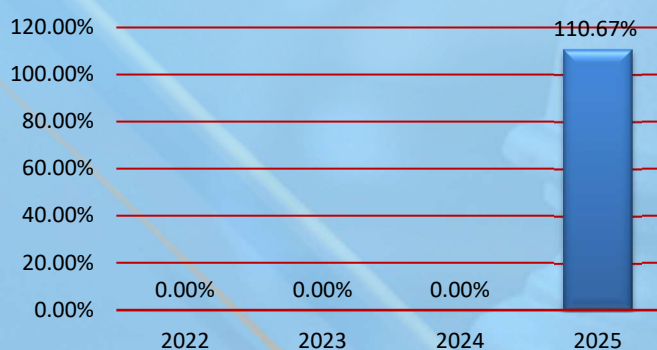
Indikator kinerja Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu adalah perbandingan jumlah perkara Pidana tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Berpadu dengan Jumlah Perkara Pidana tingkat banding yang diajukan. Perkara pidana tingkat banding adalah perkara pidana yang diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara elektronik melalui e-Berpadu dan perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional.

Sesuai tabel di bawah ini, secara umum Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu pada Tahun 2025 mencapai 110,67%.

Tabel 15. Persentase Perkara Pidana Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Berpadu

TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YG DIAJUKAN MENGGUNAKAN E-BERPADU	JUMLAH PERKARA PIDANA TINGKAT BANDING YG DIAJUKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	306	395	77,47%	70%	110,67%
2024	0	408	0	n/a	n/a
2023	0	237	0	n/a	n/a
2022	0	179	0	n/a	n/a

Grafik 6. Persentase Capaian Perkara Pidana Pada Tingkat Banding Yang Menggunakan e-Berpadu



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Persentase Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu adalah sebesar 70%. Realisasi pada indikator tersebut adalah sebesar 77,47%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melebihi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- a. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
Jika dilihat pada tabel dan grafik diatas, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan cukup drastis atau tinggi pada persentase realisasi perkara pidana yang diajukan banding dengan menggunakan e-Berpadu. Pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2024 tidak ada perkara yang diajukan dengan menggunakan aplikasi e-Berpadu sehingga realisasi nya 0%. Sedangkan di tahun 2025 ini realisasi berhasil mencapai 77,47%, dari total 395 perkara pidana yang diajukan, 306 perkara menggunakan e-Berpadu sedangkan sisa nya sejumlah 89 perkara belum bisa diajukan menggunakan e-Berpadu. Hal ini disebabkan karena Aplikasi e-Berpadu baru berjalan di bulan Februari 2025.
- b. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 70% pada Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 77,47%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 77,47%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 72,60%, namun masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target kinerja pada Benchmark Standar Nasional yaitu 89,93%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu sudah berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih sebesar 4,87% namun masih belum berhasil mencapai benchmark target kinerja dengan selisih 12,46%.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja pada indikator kinerja Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu adalah:

- a. Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk menghasilkan putusan hukum yang berkualitas yaitu putusan yang memenuhi kriteria kepastian hukum (*legal certainty*), keadilan (*justice*) dan kemanfaatan (*purposiveness*);
- b. Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PT Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025;
- c. SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus telah diterapkan dan dilaksanakan secara maksimal dan sesuai prosedur

Sedangkan alternatif solusi yang telah dilakukan dalam upaya perbaikan dan peningkatan kinerja adalah :

1. Sosialisasi kepada ASN PT Bengkulu dan PN Sewilayah Bengkulu perihal penggunaan Aplikasi e-Berpadu
2. Koordinasi langsung ke Tim IT MA/Badilum jika terdapat kendala eror atau tidak dapat akses kedalam Aplikasi e-Berpadu
3. Memberikan solusi kepada PN yang terkendala untuk menghubungi provider internet jika bermasalah dengan sinyal/jaringan
4. Monitoring rutin, berkala dan responsif kepada seluruh PN di wilayah Bengkulu jika terdapat permasalahan lainnya.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu adalah 110,67% dengan target 70% dan realisasi 77,47%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.800.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.388.099.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,94%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((22.689.318.000 \times 1,10) - (22.658.520.925))}{\sum_{i=1}^n (22.689.318.000 \times 1,10)} \times 100\%$$

$$E = 11,21\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

Cki : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu di tahun 2025 adalah sebesar 110,67%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana dan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding dan Minutasi. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara Pidana dan Pidana Khusus).

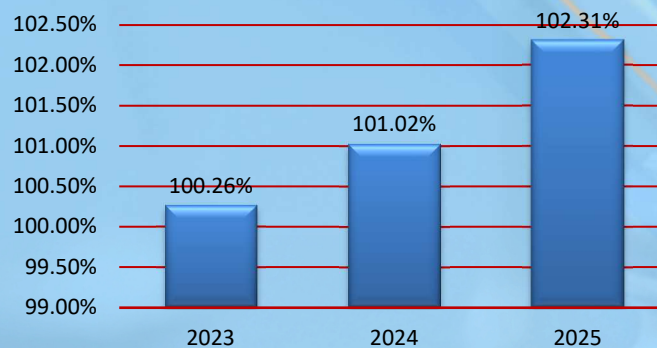
SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK

Tabel 16. Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN		
	2023	2024	2025
Indeks Kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	100,26%	101,02%	102,31%
Capaian Sasaran	100,26%	101,02%	102,31%

Grafik 7. Capaian Sasaran Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik



Sasaran strategis Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik dimaksudkan untuk menggambarkan kondisi di mana masyarakat sebagai pemangku kepentingan (stakeholder) merasa puas, aman, dan percaya terhadap integritas serta kinerja organisasi dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu. Data pada tabel 17 dan grafik 7 menunjukkan bahwa capaian sasaran Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik pada tahun 2025 mencapai 102,31%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan mewujudkan badan peradilan yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan pada Pengadilan Tinggi Bengkulu di tahun 2025 ini telah tercapai dengan sangat baik.

SASARAN 2 INDIKATOR 6

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN BERDASARKAN STANDAR LAYANAN YANG DITETAPKAN

Penetapan indikator kinerja ini adalah untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Persyaratan;
2. Sistem, mekanisme dan prosedur;
3. Waktu penyelesaian;
4. Biaya/tarif;
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan;
6. Kompetensi pelaksana;

7. Perilaku pelaksana;
8. Penanganan pengaduan, sarana dan masukan;
9. Sarana dan prasarana.

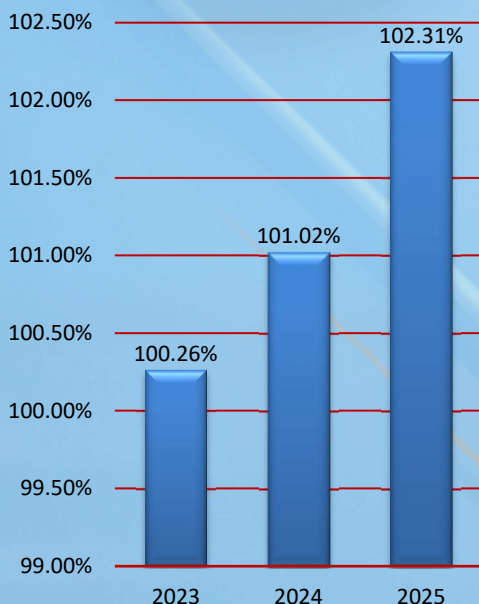
Layanan di SK KMA 026 tahun 2012 diantaranya adalah :

1. Pelayanan administrasi persidangan
2. Pelayanan pengaduan
3. Pelayanan permohonan informasi

Tabel 17. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,99	3,90	102,31%
2024	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	3,88/96,98%	3,84/96%	101,02%
2023	Index Persepsi Stakeholder yang Puas terhadap layanan peradilan	3,85/96,25%	3,84/96%	100,26%

Grafik 8. Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Berdasarkan Standar Layanan Yang Ditetapkan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BENGKULU Jl. Peningkatan: Peningkatan: Kiri, Gading Complex Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/ PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Periode 1 Januari 2023 sampai 31 Maret 2023 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT NILAI INDEKS 3,99 / 99,72% Jumlah: 36 RESPONDEN Jenis Kelamin LAKI-LAKI: 21 PENDIDIKAN: 14 Total / Belum Sekolah: 0 Diploma 2: 0 SD: 0 Diploma 3: 0 SMP: 0 S1: 26 SMU: 2 S2: 2 Diploma 1: 0 S3: 0 Pekerjaan: PNS: 0 SWASTA: 8 TNI: 0 WIRASWASTA: 0 POLRI: 0 TENAGA KONTRAK: 0 LAINNYA: 22	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BENGKULU Jl. Peningkatan: Peningkatan: Kiri, Gading Complex Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/ PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Periode 1 April 2023 sampai 30 Juni 2023 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT NILAI INDEKS 3,98 / 99,59% Jumlah: 34 RESPONDEN Jenis Kelamin LAKI-LAKI: 14 PENDIDIKAN: 20 Total / Belum Sekolah: 0 Diploma 2: 0 SD: 0 Diploma 3: 22 SMP: 0 S1: 12 SMU: 0 S2: 0 Diploma 1: 0 S3: 0 Pekerjaan: PNS: 33 SWASTA: 0 TNI: 0 WIRASWASTA: 0 POLRI: 0 TENAGA KONTRAK: 0 LAINNYA: 1
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BENGKULU Jl. Peningkatan: Peningkatan: Kiri, Gading Complex Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/ PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Periode 1 Juli 2023 sampai 30 September 2023 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT NILAI INDEKS 3,98 / 99,38% Jumlah: 36 RESPONDEN Jenis Kelamin LAKI-LAKI: 17 PENDIDIKAN: 19 Total / Belum Sekolah: 0 Diploma 2: 0 SD: 0 Diploma 3: 0 SMP: 0 S1: 30 SMU: 1 S2: 2 Diploma 1: 0 S3: 0 Pekerjaan: PNS: 30 SWASTA: 1 TNI: 0 WIRASWASTA: 0 POLRI: 0 TENAGA KONTRAK: 0 LAINNYA: 5	MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA PENGADILAN TINGGI BENGKULU Jl. Peningkatan: Peningkatan: Kiri, Gading Complex Bengkulu https://www.pt-bengkulu.go.id/ PUBLIKASI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT Periode 1 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023 SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT NILAI INDEKS 3,99 / 99,81% Jumlah: 38 RESPONDEN Jenis Kelamin LAKI-LAKI: 18 PENDIDIKAN: 18 Total / Belum Sekolah: 0 Diploma 2: 0 SD: 0 Diploma 3: 0 SMP: 0 S1: 16 SMU: 1 S2: 1 Diploma 1: 0 S3: 1 Pekerjaan: PNS: 30 SWASTA: 5 TNI: 0 WIRASWASTA: 1 POLRI: 0 TENAGA KONTRAK: 0 LAINNYA: 23

Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dilaksanakan setiap Triwulanan mengukur tingkat kepuasan publik terhadap layanan hukum di lembaga peradilan khususnya dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Populasi survey ini adalah stakeholder yang menggunakan layanan di Pengadilan Tinggi Bengkulu. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan dari sejumlah 100 (seratus) orang responden dan berdasarkan hasil survey tersebut seluruh responden mayoritas memberikan penilaian puas terhadap layanan yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah sebesar 3,90%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 juga 3,99%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

Jika dibandingkan dengan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja pada tahun 2022 dan 2023 yang juga berhasil mencapai target melebihi 100% maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu selama 4 (empat) tahun ini telah berkomitmen dan terus berupaya untuk dapat memberikan layanan terbaik kepada para masyarakat pencari keadilan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 3,90% pada Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 3,99%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun berhasil dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 3,99%, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 3,90% dan juga lebih tinggi dari target Benchmark Standar Nasional yaitu 3,78%. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui baik Target maupun Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih sebesar 0,21% dan 0,09%.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan :

- Pelaksanaan Maklumat Pelayanan secara optimal sesuai dengan Surat Keputusan Ketua PT Bengkulu Nomor 801/KPT.W8.U/SK.HM.1.1/I/2025
- Komitmen bersama seluruh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu
- Monitoring dan Evaluasi secara berkala terhadap layanan-layanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat pencari hukum di wilayah Pengadilan Tinggi Bengkulu

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan adalah 102,31% dengan target 3,90% dan realisasi 3,99%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.825.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.412.959.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 3,95%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.825.963.000 \times 1,02) - (23.412.959.313))}{\sum_{i=1}^n (23.825.963.000 \times 1,02)} \times 100\%$$
$$E = 3,95\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CKi : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan di tahun 2025 adalah sebesar 102,31%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen serta program Penegakan dan Pelayanan Hukum. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding.

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum dilaksanakan melalui pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum, mencakup diantaranya KRO/RO Penyelesaian Perkara di Tingkat Banding yang secara khusus menjadi penunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini, karena pada kegiatan ini terdapat komponen anggaran Pengiriman Surat Penahanan, Pencatatan Register Banding, Minutasi dan juga Pengiriman Salinan Putusan kepada Pengadilan Pengaju. Ketersediaan anggaran ini semakin mempermudah Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dengan didukung oleh faktor-faktor lainnya (SDM yang berintegritas, profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara)

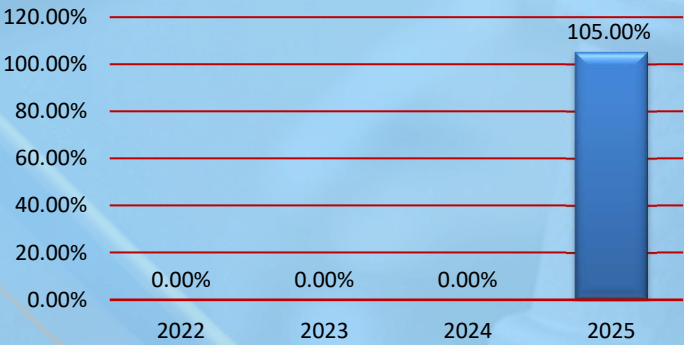
SASARAN STRATEGIS 3

TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL

Tabel 18. Capaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan Dan Profesional

INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN TAHUN			
	2022	2023	2024	2025
Indeks Profesionalitas ASN Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a	108,59%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a	105,57%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a	101,33%
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	n/a	n/a	n/a	105,26%
Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	n/a	n/a	n/a	106,25%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a	103,03%
Capaian Sasaran	n/a	n/a	n/a	105,00%

Grafik 9. Capaian Sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional



Sasaran strategis Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional dimaksudkan untuk menggambarkan upaya Pengadilan Tinggi Bengkulu dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat yang terbuka, kompeten, lugas dan akuntabel, dengan mengukur Indeks Profesionalitas ASN, Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran serta Nilai Indeks Pengelolaan Aset. Data pada tabel 19 dan grafik 9 menunjukkan bahwa capaian sasaran Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional pada tahun 2025 mencapai 105,00%. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan sasaran untuk mewujudkan Pengadilan Tinggi Bengkulu yang terbuka, kompeten, lugas dan akuntabel di tahun 2025 ini telah tercapai dengan sangat baik.

SASARAN 3 INDIKATOR 7

INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA (IP ASN) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan mengukur Nilai IP ASN yang terdiri dari komponen berikut ini :

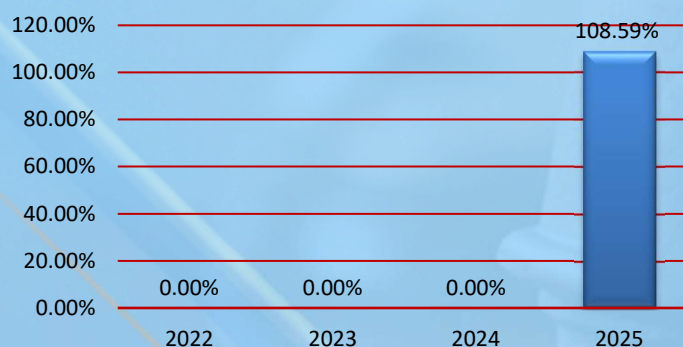
1. Kompetensi, dengan bobot sebesar 40%
2. Kinerja, dengan bobot sebesar 30%
3. Kualifikasi, dengan bobot sebesar 25%
4. Disiplin, dengan bobot sebesar 5%

Indikator Kinerja ini mempedomani Peraturan Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8 Tahun 2019. Sumber data realisasi diambil dari Aplikasi SIKEP Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Tabel 19. Persentase Capaian Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan	77,47%	71%	108,59%
2024	n/a	n/a	n/a	n/a
2023	n/a	n/a	n/a	n/a
2022	n/a	n/a	n/a	n/a

Grafik 10. Capaian Nilai IP ASN Satuan Kerja Pengadilan



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut :

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 71%. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 juga 77,47%. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. data realisasi kinerja atas IKU ini tidak tersedia (n/a=*not available*);
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 71% pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 77,47%. Jika dibandingkan maka dapat dilihat bahwa persentase yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 77,10%, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 81,62%, lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebagai Benchmark Standar Nasional oleh MARI yaitu sebesar 71%.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum bisa melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih sebesar 4,52% namun tetap berhasil melampaui target Standar Nasional dengan selisih lebih sebesar 6,10%.

*Benchmark Standar Nasional tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan :

- Monitoring berkala oleh Pimpinan dan Bagian Kepegawaian (Khususnya operator admin SIKEP) dalam memantau proses update dan validasi data pada Aplikasi SIKEP;
- Penanaman budaya kerja serta pola pikir untuk menjadi pegawai yang berintegritas, profesional, disiplin agar mampu menyelesaikan pekerjaan secara optimal, tuntas dan bertanggung jawab.

Alternatif solusi yang telah dilakukan untuk meningkatkan kinerja pada indikator ini adalah :

- Mendorong pengembangan kompetensi pegawai PT Bengkulu dengan mengusulkan untuk mengikuti berbagai pelatihan serta pendidikan dan pelatihan;
- Pendampingan bagi pegawai untuk mengunggah dokumen riwayat pendidikan, pangkat, dan pelatihan terbaru ke Aplikasi SIKEP dan portal BKN.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan adalah 100% dengan target 108,59% dan realisasi 100%. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.825.963.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.412.959.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 9,51%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.825.963.000 \times 1,08) - (23.412.959.313))}{\sum_{i=1}^n (23.825.963.000 \times 1,08)} \times 100\%$$
$$E = 9,51\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CKi : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 108,59%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program Dukungan Manajemen. Program Dukungan Manajemen dilaksanakan melalui pelaksanaan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding. Kegiatan yang terlaksana seperti :

- Monitoring rutin dan pengawasan melekat dari Pimpinan pada setiap aspek dan lini di satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu meningkatkan skor tingkat kedisiplinan pada komponen Indeks IP ASN
- Coaching dan mentoring pengisian SKP tepat waktu pada Aplikasi e-Kinerja BKN dan *update* data pada Aplikasi SIKEP meningkatkan keakuratan data profil pegawai PT Bengkulu

SASARAN 3 INDIKATOR 8

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 01 SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan merupakan pengukuran kinerja untuk tahun berjalan, terdiri dari komponen sebagai berikut:

- Revisi DIPA 01(10%)
- Penyerapan Anggaran 01(20%)
- Penyelesaian Tagihan (10%)
- Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA 01)
- Deviasi Halaman III DIPA 01(15%)
- Belanja Kontraktual (10%)
- Pengelolaan UP dan TUP (10%)

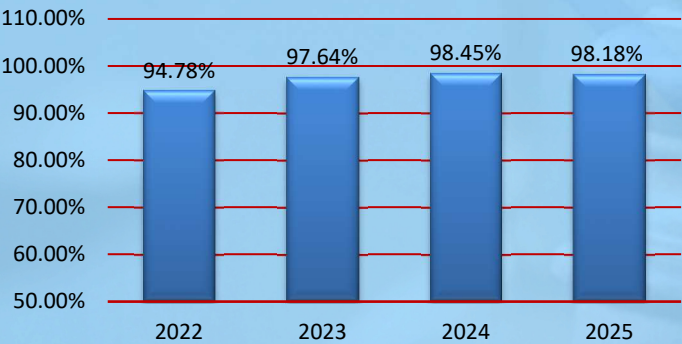
h. Capaian Output (25%)

Indikator Kinerja ini mempedomani Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 20. Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	98,18	93	105,57%
2024	Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	98,45	n/a	n/a
2023	Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	97,64	n/a	n/a
2022	Nilai IKPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	94,78	n/a	n/a

Grafik 11. Realisasi Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 93. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 adalah 98,18. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
 Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai IKPA Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki tren yang meningkat dari tahun 2022 (94,78), 2023 (97,64) dan 2024 (98,45), namun mengalami sedikit penurunan pada tahun 2025 ini menjadi 98,18. Hal ini tentu menjadi perhatian satuan kerja sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja ini di tahun-tahun yang akan datang.
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dan seterusnya. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.



3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 93 pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 98,18. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 maka dapat dilihat bahwa nilai yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 98,18, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 97,71 dan juga lebih tinggi dari target kinerja Benchmark Standar Nasional yang ditetapkan oleh MARI yaitu 93.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 0,47% dan melampaui Target Nasional dengan selisih lebih sebesar 5,18.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan :

- Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) : Satker mampu memastikan realisasi bulanan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Halaman III DIPA. Deviasi yang rendah (maksimal 5%) menunjukkan perencanaan yang matang
- Pengendalian Revisi DIPA : Meminimalisir revisi anggaran yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam perencanaan awal. Revisi sebaiknya hanya dilakukan untuk pergeseran mendesak atau kebijakan prioritas nasional.
- Kedisiplinan dalam Eksekusi Anggaran (Tepat waktu dalam penyampaian data kontrak, kecepatan proses pengujian dan penyelesaian tagihan SPP/SPM, Meminimalisir Dispensasi SPM)
- Fokus pada Pencapaian Output (memastikan data capaian output diinput secara akurat dan tepat waktu di aplikasi SAKTI); Optimalisasi Penyerapan Anggaran (Mencapai target penyerapan per triwulan (Triwulan I : 15%, II : 40%, III : 60%, IV : 90%) tanpa melakukan pemborosan di akhir tahun (*spending spree*); serta Memastikan siklus pengelolaan UP lancar (*revolving*) dan TUP dipertanggungjawabkan tepat waktu (tidak kadaluwarsa).

Selain itu ada juga beberapa alternatif solusi tambahan untuk meningkatkan kinerja indikator ini, yaitu :

1. Koordinasi Antar-Lini : Sinergi antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara dalam memonitor dashboard IKPA secara mingguan.
2. Monitoring Aplikasi SAKTI secara Real-time : Memanfaatkan modul Komitmen dan Pembayaran untuk mendeteksi potensi keterlambatan sebelum menjadi masalah.
3. Reviu Pagu Minus : Memastikan tidak ada pagu minus sebelum pengajuan SPM, yang sering terjadi pada belanja pegawai atau pemeliharaan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan adalah 105,57% dengan target 93 dan realisasi 98,18. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.826.663.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.413.651.313,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,92%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.826.663.000 \times 1,05) - (23.413.651.313))}{\sum_{i=1}^n (23.826.663.000 \times 1,05)} \times 100\%$$
$$E = 6,92\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 105,57%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program :

- a. Penguatan Tata Kelola Perencanaan, dengan kegiatan review berkala Halaman III DIPA dan rapat koordinasi pemutakhiran data kontrak.
- b. Akselerasi Penyelesaian Tagihan, dengan kegiatan Penggunaan KKP dan pembayaran non-tunai meminimalisir pengendapan UP dan mempercepat perputaran anggaran.
- c. Monitoring dan Evaluasi, dengan kegiatan Morning Briefing Pengelola Keuangan membahas hambatan teknis sehingga bisa diperoleh solusi.
- d. Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan, dengan kegiatan Coaching Aplikasi SAKTI serta mendorong SDM untuk mengikuti berbagai sosialisasi terkait anggaran atau perbendaharaan untuk memperoleh pemahaman regulasi-regulasi terbaru.

SASARAN 3 INDIKATOR 9

NILAI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN (IKPA) DIPA 03 SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan merupakan pengukuran kinerja untuk tahun berjalan, terdiri dari komponen sebagai berikut:

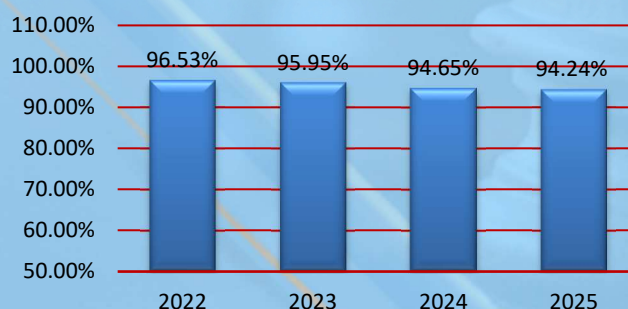
1. Revisi DIPA 03(10%)
2. Penyerapan Anggaran (20%)
3. Penyelesaian Tagihan (10%)
4. Dispensasi SPM (menjadi pengurangan nilai IKPA 03)
5. Deviasi Halaman III DIPA 03 (15%)
6. Belanja Kontraktual (10%)
7. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
8. Capaian Output (25%)

Indikator Kinerja ini mempedomani Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.

Tabel 21. Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94,24	93	101,33%
2024	Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	94,65	n/a	n/a
2023	Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	95,95	n/a	n/a
2022	Nilai IKPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	96,53	n/a	n/a

Grafik 12. Realisasi Nilai IKPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 93. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 adalah 94,24. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai IKPA DIPA 03 Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki tren yang menurun dari tahun 2022 (96,53), 2023 (95,95) dan 2024 (94,65), dan pada tahun 2025 ini menjadi 94,24. Hal ini tentu menjadi perhatian satuan kerja sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan capaian kinerja ini di tahun-tahun yang akan datang.
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 93 pada Indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 94,24. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 maka dapat dilihat bahwa nilai yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 94,24, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 93,43 dan juga lebih tinggi dari target kinerja Benchmark Standar Nasional yang ditetapkan oleh MARI yaitu 93.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 0,81 dan melampaui Target Nasional dengan selisih lebih sebesar 1,24.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan :

- Konsistensi Rencana Penarikan Dana (RPD) : Satker mampu memastikan realisasi bulanan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Halaman III DIPA 03. Deviasi yang rendah (maksimal 5%) menunjukkan perencanaan yang matang.
- Pengendalian Revisi DIPA : Meminimalisir revisi anggaran yang disebabkan oleh kurangnya ketelitian dalam perencanaan awal. Revisi sebaiknya hanya dilakukan untuk pergeseran mendesak atau kebijakan prioritas nasional.
- Kedisiplinan dalam Eksekusi Anggaran (Tepat waktu dalam penyampaian data kontrak, kecepatan proses pengujian dan penyelesaian tagihan SPP/SPM, Meminimalisir Dispensasi SPM)
- Fokus pada Pencapaian Output (memastikan data capaian output diinput secara akurat dan tepat waktu di aplikasi SAKTI); Optimalisasi Penyerapan Anggaran (Mencapai target penyerapan

per triwulan (Triwulan I : 15%, II : 40%, III : 60%, IV : 90%) tanpa melakukan pemborosan di akhir tahun (*spending spree*); serta Memastikan siklus pengelolaan UP lancar (*revolving*) dan TUP dipertanggungjawabkan tepat waktu (tidak kadaluwarsa).

Selain itu ada juga beberapa alternatif solusi tambahan untuk meningkatkan kinerja indikator ini, yaitu :

- Koordinasi Antar-Lini : Sinergi antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara dalam memonitor dashboard IKPA secara mingguan.
- Monitoring Aplikasi SAKTI secara Real-time : Memanfaatkan modul Komitmen dan Pembayaran untuk mendeteksi potensi keterlambatan sebelum menjadi masalah.
- Reviu Pagu Minus : Memastikan tidak ada pagu minus sebelum pengajuan SPM, yang sering terjadi pada belanja pegawai atau pemeliharaan.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan adalah 101,33% dengan target 93 dan realisasi 94,24. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.159.494.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.156.809.500,- atau sebesar 98,32%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 2,97%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((159.494.000 \times 1,01) - (156.809.500))}{\sum_{i=1}^n (159.494.000 \times 1,01)} \times 100\%$$
$$E = 2,97\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 101,33%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program :

- Penguatan Tata Kelola Perencanaan, dengan kegiatan review berkala Halaman III DIPA 03.
- Akselerasi Penyelesaian Tagihan, dengan kegiatan Penggunaan KKP dan pembayaran non-tunai meminimalisir pengendapan UP dan mempercepat perputaran anggaran.
- Monitoring dan Evaluasi, dengan kegiatan Morning Briefing Pengelola Keuangan membahas hambatan teknis sehingga bisa diperoleh solusi.
- Peningkatan Kompetensi SDM Pengelola Keuangan, dengan kegiatan Coaching Aplikasi SAKTI serta mendorong SDM untuk mengikuti berbagai sosialisasi terkait anggaran atau perbendaharaan untuk memperoleh pemahaman regulasi-regulasi terbaru.

SASARAN 3 INDIKATOR 10

NILAI INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (DIPA 01)

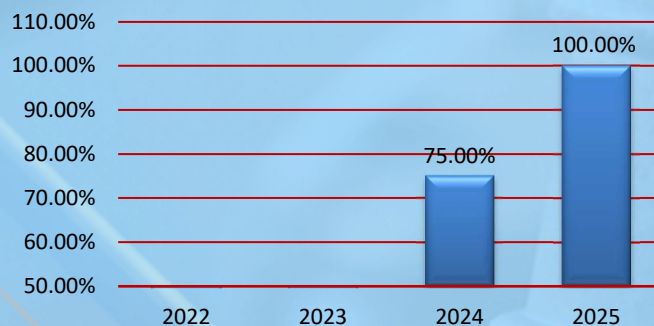
Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 merupakan pengukuran kinerja untuk tahun berjalan, terdiri dari komponen sebagai berikut :

- Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Tabel 22. Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	100	95	105,26%
2024	Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	75	n/a	n/a
2023	Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a
2022	Nilai KPA DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a

Grafik 13. Realisasi Nilai KPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01 adalah sebesar 95. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 adalah 100. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai KPA Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki tren yang meningkat dari tahun 2024 dengan nilai KPA 75, pada tahun 2025 ini meningkat menjadi 100.

- b. Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dan seterusnya. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 95 pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 100. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 maka dapat dilihat bahwa nilai yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 100, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 97,44 dan juga lebih tinggi dari target kinerja Benchmark Standar Nasional yang ditetapkan oleh MARI yaitu 75.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih lebih sebesar 2,56% dan melampaui Target Nasional dengan selisih lebih sebesar 25.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kunci utama keberhasilan pada indikator kinerja ini adalah Ketertiban Administrasi Pelaporan. Nilai 75% Efektivitas sangat bergantung pada kedisiplinan operator dalam menginput data fisik, sementara 25% Efisiensi bergantung pada kecermatan KPA/PPK dalam mengelola sisa anggaran agar tetap produktif.

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01 :

- a. Kepatuhan Satker terhadap petunjuk teknis (Juknis) dari Eselon I, terutama dalam hal pelaporan berkala dan pencapaian target-target non-finansial (seperti indeks kepuasan masyarakat).
- b. Ketepatan Input di SAKTI : memastikan progres fisik RO (jumlah perkara yang diputus atau jumlah layanan hukum) diinput setiap bulan sebelum batas waktu.

Selain itu ada juga beberapa alternatif solusi tambahan untuk meningkatkan kinerja indikator ini, yaitu :

- a. Optimalisasi Biaya Operasional : Menyelesaikan volume output yang direncanakan dengan realisasi anggaran di bawah pagu (tanpa mengurangi kualitas pelayanan)

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01 adalah 105,26% dengan target 95 dan realisasi 100. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.667.169.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.256.841.813,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 6,64%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.667.169.000 \times 1,05) - (23.256.841.813))}{\sum_{i=1}^n (23.667.169.000 \times 1,05)} \times 100\%$$

$$E = 6,64\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CKi : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01 di tahun 2025 adalah sebesar 105,26%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program :

- Program Optimalisasi Capaian RO, dengan kegiatan Monitoring Mingguan Progres Fisik vs Keuangan. Kegiatan ini memastikan setiap rupiah yang keluar segera diikuti dengan input progres volume output (misal: jumlah perkara atau laporan layanan hukum)
- Program Peningkatan Efisiensi Belanja (Cost-Effectiveness)

SASARAN 3 INDIKATOR 11

NILAI INDIKATOR KINERJA PERENCANAAN ANGGARAN (DIPA 03)

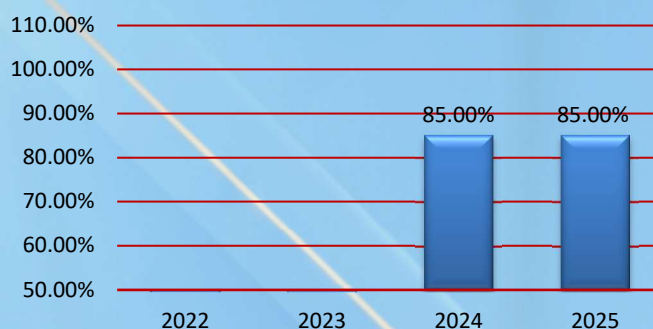
Indikator kinerja Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 merupakan pengukuran kinerja untuk tahun berjalan, terdiri dari komponen sebagai berikut :

- Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari :
 - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%)
 - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%)
 - Agregasi Capaian RO Satker (30%)
- Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker

Tabel 23. Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	85	80	106,25%
2024	Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	85	n/a	n/a
2023	Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a
2022	Nilai KPA DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a

Grafik 14. Realisasi Nilai KPA Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03 adalah sebesar 80. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 adalah 85. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya
Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi nilai KPA Pengadilan Tinggi Bengkulu memiliki tren yang stabil dari tahun 2024 dengan nilai KPA 85, pada tahun 2025 ini tetap 85.
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 80 pada Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 85. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 maka dapat dilihat bahwa nilai yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 85, lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 86,95 dan namun lebih tinggi dari target kinerja Benchmark Standar Nasional yang ditetapkan oleh MARI yaitu 75.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih kurang sebesar 1,95% dan melampaui Target Nasional dengan selisih lebih sebesar 10.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Kunci utama keberhasilan pada indikator ini adalah Ketertiban Administrasi Pelaporan. Nilai 75% Efektivitas sangat bergantung pada kedisiplinan operator dalam menginput data fisik, sementara 25% Efisiensi bergantung pada kecermatan KPA/PPK dalam mengelola sisa anggaran agar tetap produktif. Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03 :

- Penyelesaian perkara yang tepat waktu dan kualitas putusan yang sesuai standar. Data di aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) harus sinkron dengan laporan kinerja.
- Kepatuhan Satker terhadap petunjuk teknis (Juknis) dari Eselon I, terutama dalam hal pelaporan berkala dan pencapaian target-target non-finansial (seperti indeks kepuasan masyarakat).
- Ketepatan Input di SAKTI : memastikan progres fisik RO (jumlah perkara yang diputus atau jumlah layanan hukum) diinput setiap bulan sebelum batas waktu.

Selain itu ada juga beberapa alternatif solusi tambahan untuk meningkatkan kinerja indikator ini, yaitu :

- Optimalisasi Biaya Operasional : Menyelesaikan volume output yang direncanakan dengan realisasi anggaran di bawah pagu (tanpa mengurangi kualitas pelayanan)

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03 adalah 106,25% dengan target 80 dan realisasi 85. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.159.494.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.156.809.500,- atau sebesar 98,32%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 7,47%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - (RAKi))}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((159.494.000 \times 1,06) - (156.809.500))}{\sum_{i=1}^n (159.494.000 \times 1,06)} \times 100\%$$

$$E = 7,47\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAKi : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CKi : Capaian Indikator Kinerja

RAKi : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03 di tahun 2025 adalah sebesar 106,25%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program :

- Program Optimalisasi Capaian RO, dengan kegiatan Monitoring Mingguan Progres Fisik vs Keuangan. Kegiatan ini memastikan setiap rupiah yang keluar segera diikuti dengan input progres volume output (misal: jumlah perkara atau laporan layanan hukum).
- Program Peningkatan Efisiensi Belanja (Cost-Effectiveness)

SASARAN 3 INDIKATOR 12

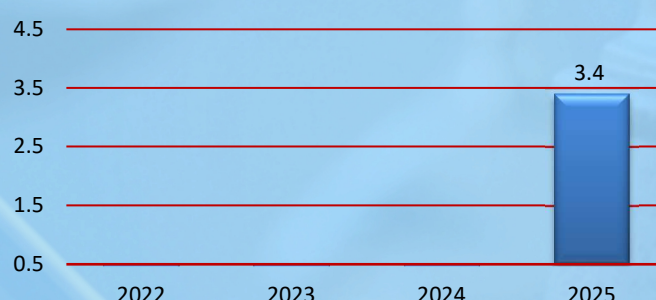
NILAI INDIKATOR PENGELOLAAN ASET (IPA) SATUAN KERJA PENGADILAN

Indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan pengukuran kinerja untuk tahun berjalan, yang mengukur kualitas tata kelola Barang Milik Negara (BMN), dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 dan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Tabel 24. Realisasi Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan

TAHUN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
2025	Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	3,40	3,30	103,03%
2024	Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a
2023	Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a
2022	Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan	n/a	n/a	n/a

Grafik 15. Realisasi Nilai IPA Satuan Kerja Pengadilan



Dari tabel dan grafik diatas dapat dilakukan analisa sebagai berikut:

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2025

Target tahun 2025 yang ditetapkan untuk indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah sebesar 3,30. Sedangkan realisasi pada indikator kinerja tersebut di tahun 2025 adalah 3,40. Hal ini berarti bahwa Pengadilan Tinggi Bengkulu berhasil mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun sebelumnya

- Perbandingan realisasi kinerja tahun 2025 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tidak diperoleh data realisasi IPA tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. (not available)
- Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tidak bisa dianalisa karena tahun 2024, 2023 dan 2022 dst. target kinerja atas IKU ini belum ditetapkan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Target Jangka Menengah pada Renstra 2025-2029

Pada dokumen Renstra 2025-2029, di tahun ini 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu menargetkan sebesar 3,30 pada Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan. Sedangkan realisasi nya adalah sebesar 3,40. Jika dibandingkan dengan target pada Renstra 2025-2029 maka dapat dilihat bahwa nilai yang telah ditargetkan untuk dicapai dalam jangka waktu menengah atau periode lima tahun dapat dicapai secara maksimal oleh satuan kerja Pengadilan Tinggi Bengkulu.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 dengan Standar Nasional

Jika dibandingkan dengan Benchmark Standar Nasional*, realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Bengkulu tahun 2025 adalah sebesar 3,40, lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata realisasi kinerja pada Standar Nasional yaitu sebesar 3,37 dan juga lebih tinggi dari target kinerja Benchmark Standar Nasional yang ditetapkan oleh MARI yaitu 3,00.

Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa pada Indikator Kinerja ini Pengadilan Tinggi Bengkulu belum berhasil melampaui Realisasi Kinerja Rata-rata Nasional Tahun 2025 dengan selisih kurang sebesar 0,03% dan melampaui Target Nasional dengan selisih lebih sebesar 0,40.

***Benchmark Standar Nasional** tersebut diperoleh dari data 34 Pengadilan Tingkat Banding pada Peradilan Umum seluruh Indonesia (Tabel Data Standar Nasional Terlampir)

5. Analisis Keberhasilan Kinerja 2025 dan Alternatif Solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa kondisi yang mendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja optimal pada indikator kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan:

- Pemanfaatan BMN untuk PNBPN : Keberhasilan diukur dari kemampuan Satker memformalkan penggunaan aset oleh pihak ketiga melalui mekanisme sewa yang sesuai tarif.
- Ketepatan Penggunaan (Usage) : Kondisi di mana seluruh gedung dan ruang kantor digunakan sesuai dengan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Penggunaan ruang yang berlebihan atau menganggur akan menurunkan nilai efektivitas aset.
- Kecepatan Penghapusan Aset Rusak Berat : Rutin mengidentifikasi aset rusak berat dan segera mengajukan usul penghapusan/lelang ke KPKNL. Membiarkan aset rusak menumpuk akan menurunkan skor IPA karena membebani neraca dan manajemen ruang.
- Penyelesaian Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) : Laporan Wasdal disampaikan secara tepat waktu setiap tahun melalui SIMAN, termasuk tindak lanjut atas surat teguran atau rekomendasi dari pengelola barang (DJKN).
- Kondisi Data "Clean and Clear" : Tidak ada selisih antara saldo aset di Modul Aset Tetap SAKTI dengan data di Master Aset SIMAN. Keberhasilan di sini didukung oleh rekonsiliasi internal yang ketat setiap bulan.
- Kelengkapan Dokumen Digital (Softcopy) : Keberhasilan penilaian sangat bergantung pada tersedianya unggahan dokumen sumber (Sertifikat Tanah, IMB/PBG, STNK) yang jelas dan valid pada aplikasi.

Selain itu ada juga beberapa alternatif solusi tambahan untuk meningkatkan kinerja indikator ini, yaitu:

- Status Hukum Tanah (Sertifikasi) : Kondisi di mana seluruh tanah kantor pengadilan sudah bersertifikat atas nama Pemerintah RI cq. Mahkamah Agung. Tanah yang masih berstatus "Kwitansi" atau atas nama pribadi/pihak lain merupakan titik lemah utama.
- Inventarisasi Fisik berkala (*Stock Opname*) : Adanya labelisasi BMN (QR Code) pada setiap barang dan pembaruan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) yang sesuai dengan kondisi riil di setiap ruangan hakim dan staf.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Indikator Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan adalah 103,03% dengan target 3,30 dan realisasi 3,40. Pagu anggaran untuk indikator ini adalah Rp.23.667.169.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp.23.256.841.813,- atau sebesar 98,27%, dapat diartikan bahwa terdapat efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 4,62%, dengan perhitungan sebagai berikut :

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAK_i \times CK_i) - (RAK_i))}{\sum_{i=1}^n (PAK_i \times CK_i)} \times 100\%$$
$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((23.667.169.000 \times 1,03) - (23.256.841.813))}{\sum_{i=1}^n (23.667.169.000 \times 1,03)} \times 100\%$$
$$E = 4,62\%$$

Keterangan :

E : Efisiensi Anggaran

PAK_i : Pagu Anggaran yang mendukung Kinerja

CK_i : Capaian Indikator Kinerja

RAK_i : Realisasi Anggaran yang mendukung Kinerja

* Tabel Perhitungan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya terlampir

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Capaian Kinerja

Capaian kinerja pada indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan di tahun 2025 adalah sebesar 103,03%. Secara umum keberhasilan capaian tersebut ditunjang oleh pelaksanaan program :

- Program Pembersihan Neraca (Asset Clean-up) berupa kegiatan Inventarisasi dan Revaluasi Aset Secara Periodik, Akselerasi Penghapusan BMN Rusak Berat.
- Program Legalitas dan Pengamanan Aset (Legal Fortification) berupa kegiatan Sertifikasi dan Balik Nama Tanah Instansi dan Digitalisasi Dokumen Kepemilikan (E-Filling).
- Program Optimalisasi Pemanfaatan (Asset Productivity) berupa kegiatan Penataan Ruang Berbasis SBSK (Standar Barang Standar Kebutuhan).
- Program Penguatan Kapasitas SDM Pengelola BMN berupa kegiatan mengikuti Workshop Intensif SIMAN v2 dan SAKTI



B. REALISASI ANGGARAN

Total alokasi anggaran yang didapatkan oleh Pengadilan Tinggi Bengkulu pada tahun 2025 adalah sebesar Rp. 23.826.663.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Rupiah*) dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Tugas (DIPA) sebagai berikut:

1. DIPA BADAN URUSAN ADMINISTRASI (01)

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. 23.667.169.000,- (*Dua Puluh Tiga Miliar Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) yang meliputi :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah kompensasi dalam bentuk uang maupun barang yang diberikan kepada pegawai negeri, pejabat negara, pensiunan serta pegawai honorer yang akan diangkat sebagai pegawai lingkup pemerintahan baik yang bertugas di dalam maupun di luar negeri sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah. Jumlah Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 20.573.702.667,- (*Dua Puluh Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*)

b. Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Jumlah Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp.2.683.139.146,- (*Dua Miliar Enam Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).

c. Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk pembayaran perolehan aset dan/atau menambah nilai aset tetap/aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan melebihi batas minimal kapitalisasi aset tetap/aset lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah. Pada Tahun 2025 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu tidak memperoleh anggaran Belanja Modal.

Tabel 25. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Pegawai	20.956.099.000	20.573.702.667	382.396.333	98,18%
Belanja Barang	2.711.070.000	2.683.139.146	27.930.854	98,97%
Belanja Modal	0	0	0	0%
TOTAL	23.667.169.000	23.256.841.813	410.327.187	98,27%

Grafik 16. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Tahun 2025



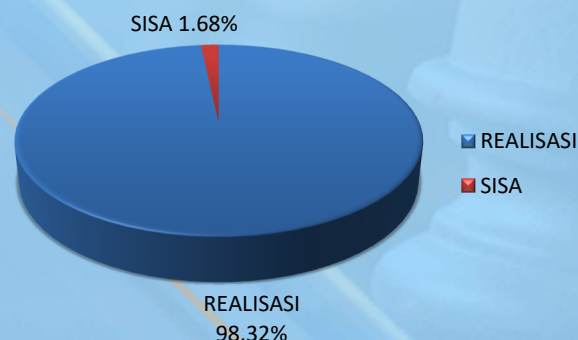
2. DIPA BADAN PERADILAN UMUM (03)

Tahun 2025 ini Pengadilan Tinggi Bengkulu mendapatkan alokasi anggaran DIPA 03 Badan Peradilan Umum berupa Belanja Barang sejumlah Rp.159.494.000,- (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah*). Belanja Barang pada DIPA 03 ini ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan di Pengadilan Tinggi Bengkulu.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2025

JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN
Belanja Barang	159.494.000	156.809.500	2.684.500	98,32%
TOTAL	159.494.000	156.809.500	2.684.500	98,32%

Grafik 17. Realisasi Anggaran Belanja DIPA 03 Tahun 2025



REALISASI ANGGARAN PER KEGIATAN

DIPA 01 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama. Sedangkan DIPA 03 digunakan untuk melaksanakan kegiatan Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Tabel 27. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2025

NO	KEGIATAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding	23.667.169.000	23.256.841.813	410.327.187	98,27%
2	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	159.494.000	156.809.500	2.684.500	98,32%

Tabel 28. Laporan Realisasi Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	VOLUME	REALISASI
1	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	145	370
2	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	22	22

Dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

Tabel 29. Laporan Realisasi Anggaran Penyelesaian Perkara Pidana

NO	URAIAN	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	%	SISA ANGGARAN (Rp)
1.	Perkara Pidana Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	67.141.000	66.114.500	98,532	1.026.500
2.	Perkara Pidana Korupsi Yang Diselesaikan Di Tingkat Banding	12.353.000	11.050.000	89,45	1.303.000

INFORMASI KEUANGAN YANG DIBIYAI OLEH PARA PIHAK (Perkara Perdata)

Tabel 30. Laporan Keadaan Perkara Perdata Tahun 2025

SISA 2024	MASUK 2025	PUTUS 2025	SISA 2025
2	50	46	6

Tabel 31 Laporan Keuangan Perkara Perdata Tahun 2025

URAIAN	SALDO AWAL (Des 24)	PENERIMAAN 2025	PENGELUARAN 2025	SALDO AKHIR 2025 (Saldo Awal + Penerimaan - Pengeluaran)
Biaya Perkara	Rp. 40.000	Rp. 150.000 x 51 berkas = Rp. 7.650.000	(Rp. 130.000 x 51 berkas) + (Rp 20.000 x 47 berkas) = Rp. 6.900.000	Rp. 120.000

*Keterangan : Selisih jumlah perkara masuk dan putus dengan data SIPP, karena ada 1 perkara (Nomor 18/PDT/2025/PTBGL) yang 2 kali mengajukan banding, sehingga biaya perkara terhitung masuk dua kali.

Adapun rincian biaya perkara perdata sebesar Rp.150.000,- adalah sebagai berikut :

Biaya Pemberkasan : Rp. 130.000,-

Biaya Materai : Rp. 10.000,-

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

Total : Rp. 150.000,-

Gambar 3. Rician Biaya Perkara Perdata di SIPP



SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Selamat Datang **Turjan, SH**
Anda Login Sebagai **Panitera Muda Hukum**

[Keluar](#)

[Perkara Yang Ditangani](#) [Edit Profile](#)

Home | Perdata Banding | Banding Pidana | Pidana Anak | Tipikor | SPPT | Laporan | Jadwal Sidang | System | Pesan | Arsip Perkara | Antrian

INFORMASI DETAIL PERKARA BANDING

[Kembali](#)

Nama Pengadilan TK I / Nomor Perkara	Tanggal Putusan TK I / Jenis Perkara	Nomor Perkara Tingkat Banding	Majelis Hakim / Panitera Pengganti	Status Perkara Lama Proses Perkara
Nama Pengadilan : PENGADILAN NEGERI BENGKULU Nomor Perkara : 8/Pdt.G/2025/PN Bgl	Tanggal Putusan: Kamis, 16 Okt. 2025 Jenis Perkara : Perbuatan Melawan Hukum	eCourt 43/PDT/2025/PT BGL	Majelis Hakim : Hakim Ketua : DUTA BASKARA, S.H.,M.H. Hakim Anggota : H. SAHLAN EFENDI, S.H., M.H. Hakim Anggota : R AZHARYADI PRIAKUSUMAH, S.H., M.H. Panitera Pengganti: Darno, SH	Status Terakhir : Minutasi Lama Proses : 33 Hari

Berkas | Data Umum | Penetapan | Court Calendar | Jadwal Sidang | Pertimbangan Hukum | Putusan Akhir | Tanda Tangan Elektronik | **Biaya Perkara** | Riwayat Perkara

Biaya Tingkat Banding

No	Tanggal Transaksi	Uraian	Jumlah			Keterangan
			Pemasukan	Pengeluaran	Sisa	
1	Kamis, 13 Nov. 2025	Biaya Perkara	Rp. 150.000		Rp. 150.000	
2	Kamis, 13 Nov. 2025	Biaya Pemberkasan		Rp. 130.000	Rp. 20.000	
3	Selasa, 16 Des. 2025	Materai		Rp. 10.000	Rp. 10.000	
4	Selasa, 16 Des. 2025	Redaksi		Rp. 10.000	Rp. 0	
Total			Rp. 150.000	Rp. 150.000	Rp. 0	

Load Time : 0.0091 Sec/Memory Available: 5048M/Memory Usage : 1.54MB Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015 Version: 5.0.0

Tabel 32. Matriks Realisasi Anggaran Tahun 2025 Yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	159.494.000	Belanja Barang	156.809.500	2.684.500	98,32
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju							
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan							
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court							
		e. Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu							

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM	SUMBER ANGGARAN	PAGU ANGGARAN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI	
								Rp	%
2.	Meningkatnya tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	f. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	<u>Program</u> : Penegakan dan Pelayanan Hukum <u>Kegiatan</u> : Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	DIPA 03 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum	159.494.000	Belanja Barang	156.809.500	2.684.500	98,32
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	h. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	<u>Program</u> : Dukungan Manajemen <u>Kegiatan</u> : Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi	23.667.169.000	a. Belanja Non Operasional b. Belanja Gaji dan Tunjangan c. Belanja Operasional	23.256.841.813	410.327.187	98,27
		i. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan							
		j. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan							
		k. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01							
		l. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03							
		m. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan							

C. TINDAK LANJUT LHE AKIP TAHUN 2024

Berikut adalah matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024 Pengadilan Tinggi Bengkulu.

**Tabel 33. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024
Pengadilan Tinggi Bengkulu**

No	Rekomendasi LHE Tahun 2024	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1.	Dokumen reuiu atas Renstra maupun IKU harus menyampaikan alasan perubahan. Rekomendasi perubahan dokumen RENSTRA dan IKU dapat memperhatikan SK Kabawas No.121/BP/SK.PW1/XII/2023 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia	Dokumen Reuiu Renstra dan Reuiu IKU PT Bengkulu belum menyampaikan alasan perubahan.	Melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada Dokumen Reuiu Renstra dan Reuiu IKU	Tersusunnya Dokumen Renstra dan Reuiu IKU yang memenuhi standar dan pedoman yang berlaku	Januari 2026	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1-fKXo85Fj7dB-BaAaQnpdC-mubK0nb5tIh?usp=drive-link

2	Dokumen perencanaan kinerja agar menggambarkan seluruh kebutuhan kinerja yang perlu dicapai. Pimpinan unit akuntabilitas kinerja agar menetapkan indikator kinerja lainnya atas tugas fungsi satuan kerja.	PT Bengkulu belum menetapkan Indikator Kinerja Lainnya sesuai tusi satuan kerja	Menetapkan Indikator Kinerja Lainnya sesuai tusi satuan kerja	Tersusunnya Dokumen Indikator Kinerja Tambahan/Lainnya	Oktober 2025	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/17Y2zMi4bylD_A6mOzDlZ860vQWr8lu_o?usp=drive_link
3	Dalam melakukan penyusunan dokumen perencanaan kinerja, agar penetapan target memperhatikan target kinerja jangka menengah, pencapaian kinerja sampai dengan periode evaluasi, serta memperhatikan monitoring atas capaian realisasi pada tahun berjalan.	Penetapan target kinerja belum memenuhi kriteria yang baik (menantang)	Menetapkan target dengan berdasarkan	Tersusunnya Dokumen Revisi PKT dan Renstra dengan memenuhi kriteria target yang baik	Oktober 2025	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1JXX2XL08lukcVQ0IBZ1SuJIZMnwX0Du?usp=drive_link
4	Dalam penyusunan dokumen monitoring evaluasi Rencana Aksi agar disesuaikan dengan format pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Dokumen Monev Renaksi belum sesuai format (berpedoman pada Surat Sekma Nomor 1282 perihal TLHE Akip MA)	Melakukan perbaikan pada Dokumen Monev Renaksi (Revisi Monev Renaksi 2025)	Tersusunnya Dokumen Revisi Monev Rencana Aksi sesuai format dengan berpedoman pada Surat Sekma Nomor 1282	Oktober 2025	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1whbN7fTfYzaQD1fC0q0UAn8FEpXla?usp=drive_link
B. Pengukuran Kinerja								
1.	Dalam merumuskan definisi operasional indikator kinerja dapat menjelaskan antara lain: variabel waktu penyelesaian perkara pidana khusus, pihak stakeholder sebagai responden survey, dan indikator Persentase Salinan Putusan Pengadilan Yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	Definisi Operasional Indikator Kinerja belum dirumuskan secara jelas	Menyempurnakan penyusunan Dokumen Kamus IKU PT Bengkulu	Tersusunnya Dokumen Revisi Kamus IKU	Oktober 2025	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1nykDxbRp_5p5x5KPaJ1x_Qbck33tdN?usp=drive_link
C. Pelaporan Kinerja								
1.	Agar pada Bab III LKJIP menjelaskan informasi keberhasilan/ kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/ penyempurnaannya.	Pada Bab III LKJIP belum menggambarkan /menjelaskan informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya	Menyempurnakan Penyusunan Dokumen LKJIP Bab III	Tersusunnya Dokumen LKJIP Bab III yang menjelaskan informasi keberhasilan /kegagalan kinerja serta upaya perbaikan dan penyempurnaannya	Februari 2026	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1rlnulkiQFLA0HHozSdx5vkmYalB0y?usp=drive_link
2.	Dalam dokumen LKJIP agar menginformasikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), dan perbandingan dengan tingkat nasional, serta informasi target kinerja dalam LKJIP memperhatikan kesesuaian dengan penetapan target dalam dokumen Perjanjian Kinerja.	Pada Bab III LKJIP belum menginformasikan analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), dan perbandingan dengan tingkat nasional	Menyempurnakan Penyusunan Dokumen LKJIP Bab III	Tersusunnya Dokumen LKJIP Bab III yang menjelaskan informasi analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah (Renstra), dan perbandingan dengan tingkat nasional	Februari 2026	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1xBBjIPcPUSbrXOa8wriAYDWitUBXqynL?usp=drive_link
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1.	Agar pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian kinerja dilakukan secara berjenjang untuk menghasilkan rekomendasi perbaikan atau penyesuaian atas kebijakan maupun aktivitas beserta tindak lanjutnya.	Pelaksanaan Monev Capaian Kinerja belum dilaksanakan secara berjenjang	Melaksanakan Monev Capaian Kinerja secara berjenjang	Terlaksananya Monev Capaian Kinerja berjenjang	Januari 2026	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/16PbZm-Zvp6rob0t4eRuEvY6in0QZpoi?usp=drive_link



2.	Agar dokumen tindak lanjut hasil evaluasi akuntabilitas penyusunannya memperhatikan Surat Sekretaris Mahkamah Agung No. 1282/SEK/OT.01.1/7/2023 tanggal 17 Juli 2023, Hal Tindak Lanjut atas Hasil Evaluasi AKIP Mahkamah Agung Tahun 2022.	Penyusunan dokumen TLHE belum sesuai pedoman Surat Sekma Nomor 1282	Menyempurnakan penyusunan Dokumen TLHE sesuai dengan format pada Surat Sekma Nomor 1282	Tersusunnya Dokumen TLHE AKIP PT Bengkulu sesuai format dan pedoman	Januari 2026	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1MXEQm-090dfTJf923M_XzpMiwNiUfzD?usp=drive_link
3.	Agar melaksanakan bimtek/ pelatihan terkait penguatan kompetensi pelaksana evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	Evaluasi AKIP Internal belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai	Melaksanakan DDTK perihal Evaluasi SAKIP bagi SDM di PT dan PN	Tertaksananya DDTK SAKIP secara Daring, dengan materi pokok penyusunan dan evaluasi SAKIP	Desember 2025	Sekretaris	Selesai (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/1Z74--E03am02szEDi2spQb0L5gBThUmb?usp=drive_link



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK **#bangga**
melayani
bangsa
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



BAB IV PENUTUP

ZONA
INTEGRITAS
NO KORUPSI



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun 2025 menyajikan 3 (Tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 5 indikator pada Sasaran Strategis I Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, 1 indikator pada Sasaran Strategis II Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik dan 6 indikator pada Sasaran Strategis III Terwujudnya Manajemen Peradilan Yang Transparan dan Profesional. Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan "Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 103,74%. Dari 12 indikator kinerja yang diperjanjikan, seluruhnya dinyatakan berhasil karena dapat mencapai target, bahkan ada 9 indikator kinerja yang melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian sasaran tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi Bengkulu telah terlaksana dengan baik. Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor antara lain :

1. Peningkatan fungsi pengawasan bidang dan asesmen internal secara rutin dan berkala
2. Adanya berbagai kebijakan yang menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dengan mengikuti kegiatan Bimtek, Diklat, Sosialisasi dan Pembinaan
4. Berbagai Inovasi yang diciptakan dan terus dikembangkan mengikuti perkembangan teknologi oleh SDM Pengadilan Tinggi Bengkulu
5. Adanya ketersediaan sarana prasarana sebagai faktor penunjang.

Hasil Capaian Kinerja pada LKjIP 2025 selanjutnya akan digunakan sebagai bahan evaluasi dalam penentuan target dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026.

B. REKOMENDASI

Walaupun pada tahun 2025 ini seluruh target dapat tercapai namun tetap harus dipersiapkan dalam menghadapi berbagai kendala dan permasalahan yang bisa menyebabkan tidak tercapainya sasaran di masa yang akan datang. Ini sebagai bentuk upaya preventif Pengadilan Tinggi Bengkulu agar tetap bisa mempertahankan capaian kinerja yang baik dan maksimal tersebut di tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu direkomendasikan untuk terus melakukan :

1. Penguatan Organisasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat
2. Penguatan Pengawasan internal maupun eksternal serta monitoring evaluasi secara berkala dari Pimpinan Pengadilan
3. Peningkatan Koordinasi dan Kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat dan civil society sebagai bagian integral dari pengadilan
4. Penguatan Produktifitas dan Administrasi penyelesaian perkara
5. Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Peningkatan Sarana Prasarana dan kualitas lingkungan kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN 1

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

**ZONA
INTEGRITAS**





REVISI
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BENGKULU



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 NOMOR : 2573/KPT.W8-U/RA1.10/X/2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Selanjutnya disebut **pihak pertama**,

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA RI
Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.



Bengkulu, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Nomor : 2573/KPT.W8-U/RA1.10/X/2025

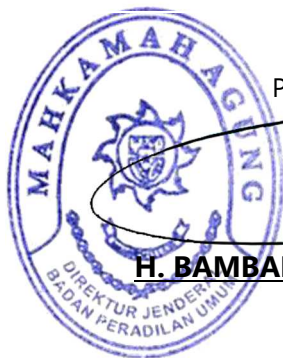
NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern	Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%
		Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju	100%
		Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	100%
		Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-Court	90%
		Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan e-Berpadu	70%
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,90
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	71
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	93
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	93
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01	95
		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03	80
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,30

Kegiatan

1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Anggaran

Rp. 25.085.466.000
Rp. 159.494.000



Pihak Kedua

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.



Bengkulu, 31 Oktober 2025
Pihak Pertama

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN 2

Capaian Kinerja Nasional Tahun 2025

**ZONA
INTEGRITAS**





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor. 58 RT 1, RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih,
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10640
www.badilum.mahkamahagung.go.id, ditjen.badilum@mahkamahagung.go.id

Nomor : 425/DJU/OT1.6/II/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Hal : Data Target dan Capaian Kinerja
Pengadilan Tingkat Banding Tahun
2025

Jakarta, 20 Februari 2026

Yth. Ketua Pengadilan Tinggi
di Seluruh Indonesia

Dalam rangka pelaksanaan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sesuai Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung nomor : 2049/SEK/SK /X II/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, sebagai bahan analisis perbandingan informasi target kinerja satuan kerja dengan realisasi kinerja (*benchmark*) di level nasional Tahun 2025 seluruh Pengadilan Tingkat Banding di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, maka berikut kami lampirkan data target dan capaian kinerja nasional pada Pengadilan Tingkat Banding diseluruh di Indonesia tahun 2025.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Umum



Bambang Myanto

BENCHMARK KINERJA PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM TAHUN 2025

No	Kode Satker	Kode WIL	Satuan Kerja	Sasaran Strategis I : Terwujudnya peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsif dan modern												Sasaran Strategis II : Meningkatkan Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik						Sasaran Strategis III : Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional																							
				Indikator Kinerja												Indikator Kinerja						Indikator Kinerja																							
				Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu			Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju			Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan			Persentase perkara perduta pada tingkat banding yang menggunakan eCourt			Persentase perkara pidana pada tingkat banding yang menggunakan eBerpadu			Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan			Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASH) Satuan Kerja Pengadilan			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 01			Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA 03			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 01			Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA 03			Indeks Pengelolaan Aset Satuan Kerja								
				Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian						
1	099062	0100	Pengadilan Tinggi Jakarta	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	96%	101%	90%	94%	105%	3,78	3,61	96%	71	87,48	123%	93	98,45	106%	93	90,75	98%	75	100	133%	75	87,45	117%	3,00	3,45	115%						
2	099067	0200	Pengadilan Tinggi Bandung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	41%	46%	3,78	3,97	105%	71	82,45	116%	93	93,2	100%	93	86,42	93%	75	93,3	124%	75	95,62	127%	3,00	3,18	106%						
3	099090	0300	Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	79%	88%	3,78	3,94	104%	71	77,24	109%	93	99,71	107%	93	95,34	103%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,3	110%						
4	400343	0400	Pengadilan Tinggi Yogyakarta	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	72%	80%	3,78	3,928	104%	71	78,5	111%	93	97,41	105%	93	91,37	98%	75	100	133%	75	89,85	120%	3,00	3,3	110%						
5	099132	0500	Pengadilan Tinggi Surabaya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,93	104%	71	75,87	107%	93	99,28	107%	93	93,18	100%	75	90,71	121%	75	87,99	117%	3,00	3,1	103%						
6	099169	0600	Pengadilan Tinggi Banda Aceh	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	99%	110%	96%	100%	104%	90%	80%	89%	3,78	3,9	103%	71	79,42	112%	93	99,48	107%	93	99,3	107%	75	100	133%	75	85,77	114%	3,00	3,25	108%						
7	099189	0700	Pengadilan Tinggi Medan	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	89%	99%	3,78	3,86	102%	71	81,85	115%	93	98	105%	93	98	105%	75	98	131%	75	83	111%	3,00	3,65	122%						
8	099204	0800	Pengadilan Tinggi Padang	96%	98%	102%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	71%	79%	3,78	3,83	101%	71	81,33	115%	93	94,7	102%	93	86,86	93%	75	81,25	108%	75	85	113%	3,00	3,37	112%						
9	400493	0900	Pengadilan Tinggi Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	52%	58%	3,78	3,96	105%	71	81,58	115%	93	100	108%	93	100	108%	75	85	113%	75	85	113%	3,00	3,2	107%						
10	400504	1000	Pengadilan Tinggi Jambi	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	4	106%	71	79	111%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,75	125%						
11	099225	1100	Pengadilan Tinggi Palembang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	85%	3,78	3,99	106%	71	84,87	120%	93	95,14	102%	93	98,25	106%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,175	106%						
12	400365	1200	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	81%	90%	3,78	4	106%	71	80,63	114%	93	97,72	105%	93	85,8	92%	75	100	133%	75	100	133%	3,00	3,1	103%						
13	400252	1300	Pengadilan Tinggi Pontianak	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	77%	85%	3,78	3,89	103%	71	87,26	123%	93	99	106%	93	89,4	96%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,625	121%						
14	400359	1400	Pengadilan Tinggi Palangkaraya	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	86%	3,78	3,96	105%	71	83,98	118%	93	99,08	107%	93	96,41	104%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,35	112%						
15	099253	1500	Pengadilan Tinggi Banjarmasin	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	104%	90%	87%	97%	3,78	3,98	105%	71	81,63	115%	93	98,77	106%	93	94,99	102%	75	100	133%	75	82	109%	3,00	3,25	108%						
16	400529	1600	Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	54%	60%	3,78	3,94	104%	71	84,24	119%	93	98,84	106%	93	90,46	97%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,6	120%						
17	099313	1700	Pengadilan Tinggi Manado	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	78%	87%	3,78	3,87	102%	71	77,33	109%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	91,49	122%	3,00	3,68	123%						
18	400535	1800	Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,90	103%	71	86,93	122%	93	98,63	106%	93	94,01	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,325	111%						
19	099419	1900	Pengadilan Tinggi Makassar	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	76%	84%	3,78	3,64	96%	71	78,69	111%	93	100	108%	93	85,83	92%	75	83,73	112%	75	73,2	98%	3,00	2,95	98%						
20	400541	2000	Pengadilan Tinggi Kendari	96%	99%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	79%	88%	3,78	3,9	103%	71	79,53	112%	93	97,66	105%	93	84,37	91%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	4	133%						
21	099692	2100	Pengadilan Tinggi Ambon	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	99%	103%	90%	66%	73%	3,78	3,97	105%	71	82,2	116%	93	93	100%	93	93	100%	75	96,26	128%	75	96,26	128%	3,00	3,2	107%						
22	099774	2200	Pengadilan Tinggi Denpasar	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	83%	93%	3,78	3,91	103%	71	82,17	116%	93	99,97	107%	93	99,15	107%	75	100	133%	75	83,5	111%	3,00	3,525	118%						
23	400560	2300	Pengadilan Tinggi Mataram	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	74%	83%	3,78	3,87	102%	71	85,05	120%	93	98,89	106%	93	93,33	100%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,33	111%						
24	400246	2400	Pengadilan Tinggi Kupang	96%	100%	103%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	52%	58%	3,78	3,97	105%	71	79,92	113%	93	100	108%	93	100	108%	75	100	133%	75	86,62	115%	3,00	3,125	104%						
25	400023	2500	Pengadilan Tinggi Jayapura	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	57%	64%	3,78	3,85	102%	71	76,44	108%	93	97,99	105%	93	87,97	95%	75	100	133%	75	77,7	104%	3,00	3,2	107%						
26	400513	2600	Pengadilan Tinggi Bengkulu	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	102%	90%	77%	86%	3,78	3,99	106%	71	77,1	109%	93	98,18	106%	93	94,24	101%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,4	113%						
27	664523	2800	Pengadilan Tinggi Maluku Utara	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,8	101%	71	84,72	119%	93	98,86	106%	93	91,17	98%	75	100	133%	75	85	113%	3,00	3,2	107%						
28	663399	2900	Pengadilan Tinggi Banten	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	98%	103%	90%	20%	22%	3,78	3,88	103%	71	82,3	116%	93	98,64	106%	93	99,68	107%	75	100	133%	75	93,81	125%	3,00	3,5	117%						
29	663404	3000	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	63%	71%	3,78	3,95	104%	71	84,61	119%	93	99,97	107%	93	98,3	106%	75	100	133%	75	94,24	126%	3,00	3,6	120%						
30	664540	3100	Pengadilan Tinggi Gorontalo	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	100%	111%	3,78	3,96	105%	71	74,14	104%	93	97,57	105%	93	93,19	100%	75	92,14	123%	75	84,69	113%	3,00	3,64	121%						
31	526707	3200	Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau	96%	100%	104%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	43%	48%	3,78	3,97	105%	71	83,88	118%	93	100	108%	93	89,94	97%	75	100	133%	75	88,68	118%	3,00	3,25	108%						
32	526717	3300	Pengadilan Tinggi Papua Barat	96%	97%	100%	100%	100%	100%	90%	100%	111%	96%	100%	104%	90%	67%	75%	3,78	3,72	9																								



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN 3

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Tahun 2025

**ZONA
INTEGRITAS**





NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PAGU ANGGARAN 2024			REALISASI	CAPAIAN KINERJA	PENYERAPAN ANGGARAN	TINGKAT EFISIENSI	ANALISIS EFISIENSI
			Uraian (RO/Komponen)	DIPA	(Rp)	(Rp)	(%)	(%)	(%)	
1	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif dan Modern	Persentase Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	100%	98.18%	1.82%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 1,73% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Penyelesaian Perkara secara Tepat Waktu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	100%	98.97%	1.03%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	100%	100.00%	0.00%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	100%	99.61%	0.39%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	100%	99.44%	0.56%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	100%	98.47%	1.53%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	100%	89.45%	10.55%	
			Jumlah		23,825,963,000	23,412,959,313	100%	98.27%	1.73%	
2		Persentase Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	100%	98.18%	1.82%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 1,73% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Pengiriman Salinan Putusan tepat waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding ke Pengadilan Pengaju
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	100%	98.97%	1.03%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	100%	100.00%	0.00%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	100%	99.61%	0.39%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	100%	99.44%	0.56%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	100%	98.47%	1.53%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	100%	89.45%	10.55%	
			Jumlah		23,825,963,000	23,412,959,313	100%	98.27%	1.73%	
3		Persentase Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	100%	98.18%	1.82%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 1,73% dalam mencapai kinerja 100% pada Indikator Kinerja Putusan Pengadilan yang diunggah pada Direktori Putusan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	100%	98.97%	1.03%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	100%	100.00%	0.00%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	100%	99.61%	0.39%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	100%	99.44%	0.56%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	100%	98.47%	1.53%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	100%	89.45%	10.55%	
			Jumlah		23,825,963,000	23,412,959,313	100%	98.27%	1.73%	

4		Persentase Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	108.89%	98.18%	9.84%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 9,75% dalam mencapai kinerja 108,89% pada Indikator Kinerja Perkara Perdata pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Court
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	108.89%	98.97%	9.11%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	108.89%	100.00%	8.16%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	108.89%	99.61%	8.52%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	108.89%	99.44%	8.68%	
			Jumlah		23,746,469,000	23,335,794,813	108.89%	98.27%	9.75%	
5		Persentase Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	110.67%	98.18%	11.29%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 11,21% dalam mencapai kinerja 110,67% pada Indikator Kinerja Perkara Pidana pada Tingkat Banding yang menggunakan e-Berpadu
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	110.67%	98.97%	10.57%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	110.67%	100.00%	9.64%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	110.67%	99.61%	9.99%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	110.67%	98.47%	11.02%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	110.67%	89.45%	19.17%	
			Jumlah		23,800,963,000	23,388,099,313	110.67%	98.27%	11.21%	
6	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	102.31%	98.18%	4.04%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 3,95% dalam mencapai kinerja 102,31% pada Indikator Kinerja Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan berdasarkan Standar Layanan yang ditetapkan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	102.31%	98.97%	3.26%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	102.31%	100.00%	2.26%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	102.31%	99.61%	2.64%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	102.31%	99.44%	2.81%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	102.31%	98.47%	3.75%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	102.31%	89.45%	12.57%	
			Jumlah		23,825,963,000	23,412,959,313	102.31%	98.27%	3.95%	
7	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP-ASN) Satuan Kerja Pengadilan	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	108.59%	98.18%	9.59%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 9,51% dalam mencapai kinerja 108,59% pada Indikator Kinerja Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	108.59%	98.97%	8.86%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	108.59%	100.00%	7.91%	
			Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	108.59%	99.61%	8.27%	
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	108.59%	99.44%	8.43%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	108.59%	98.47%	9.32%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	108.59%	89.45%	17.62%	
			Jumlah		23,825,963,000	23,412,959,313	108.59%	98.27%	9.51%	

8		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	105.57%	98.18%	7.00%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 6,92% dalam mencapai kinerja 105,57% pada Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 01 Satuan Kerja Pengadilan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	105.57%	98.97%	6.25%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	01	700,000	692,000	105.57%	98.86%	6.36%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	105.57%	100.00%	5.28%	
			Jumlah		23,667,169,000	23,256,841,813	105.57%	98.27%	6.92%	
9		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan	Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	101.33%	99.61%	1.70%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 2,97% dalam mencapai kinerja 101,33% pada Indikator Kinerja Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA 03 Satuan Kerja Pengadilan
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	101.33%	99.44%	1.87%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	101.33%	98.47%	2.82%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	101.33%	89.45%	11.72%	
			Jumlah		159,494,000	156,809,500	101.33%	98.32%	2.97%	
10		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	105.26%	98.18%	6.73%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 6,64% dalam mencapai kinerja 105,26% pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 01
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	105.26%	98.97%	5.98%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	01	700,000	692,000	105.26%	98.86%	6.08%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	105.26%	100.00%	5.00%	
			Jumlah		23,667,169,000	23,256,841,813	105.26%	98.27%	6.64%	
11		Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03	Dukungan Penyelesaian Perkara	03	55,000,000	54,785,000	106.25%	99.61%	6.25%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 7,47% dalam mencapai kinerja 106,25% pada Indikator Kinerja Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (KPA) DIPA 03
			Rapat Koordinasi Penyelesaian Perkara Perdata	03	25,000,000	24,860,000	106.25%	99.44%	6.41%	
			Perkara Pidana yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	67,141,000	66,114,500	106.25%	98.47%	7.32%	
			Perkara Pidana Korupsi yang diselesaikan di Tingkat Banding	03	12,353,000	11,050,000	106.25%	89.45%	15.81%	
			Jumlah		159,494,000	156,809,500	106.25%	98.32%	7.47%	
12		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Gaji dan Tunjangan	01	20,956,099,000	20,573,702,667	103.03%	98.18%	4.71%	Total tingkat efisiensi optimalisasi penggunaan anggaran adalah 4,62% dalam mencapai kinerja 103,03% pada Indikator Kinerja Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
			Operasional dan Pemeliharaan Kantor	01	2,710,070,000	2,682,147,146	103.03%	98.97%	3.94%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin	01	700,000	692,000	103.03%	98.86%	4.05%	
			Layanan Pemantauan dan Evaluasi	01	300,000	300,000	103.03%	100.00%	2.94%	
			Jumlah		23,667,169,000	23,256,841,813	103.03%	98.27%	4.62%	



Bengkulu, 10 Januari 2026
 TU PENGADILAN TINGGI BENGKULU

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN 4

Formulir Reviu LKjIP

Tahun 2025

**ZONA
INTEGRITAS**



FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

No	Pernyataan		Check list
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting (Instansi Pemerintah) IP. 2. LKj telah menyajikan informasi kinerja IP yang memadai. 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan. 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√ √ √ √ √ √
II	Mekanisme Penyusunan	1. LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai. 3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj. 4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja. 5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait. 7. LKjIP bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√ √ √ √ √ √ √
III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kerja. 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis. 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 4. Target Indikator Kinerja. 5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja. 6. IKU pada LKj telah sesuai dengan dokumen IKU yang ditetapkan. 7. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai. 8. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat. 9. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran. 10. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai. 11. IKU dan IK telah SMART	√ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Bengkulu, 25 Februari 2026

Pereviu I

Pereviu II

Dr. BAMBANG EKA PUTRA, SH., M.H.

SUMEDI, S.H., M.H





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

BerAKHLAK

Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

LAMPIRAN 5

SK Tim Penyusun LKjIP

Tahun 2025

**ZONA
INTEGRITAS**





SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
NOMOR : 601/W8-U/SK/OT1.6/II/2026

Tentang

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas yang ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015;

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU);
11. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 Tanggal 25 Nopember 2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI BENGKULU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2025 PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu;
- KETIGA : Memerintahkan kepada masing-masing tim untuk mengimplementasikan keputusan ini dan melaksanakan tugas sampai dengan bulan April Tahun 2026
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Bengkulu Tahun Anggaran 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



KETUA

ARIFIN

Lampiran I Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : 601/W8-U/SK/OT1.6/II/2026
Tanggal : 02 Februari 2026

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN 2025**

NO	JABATAN	NAMA
1	2	3
1.	PENANGGUNG JAWAB	Dr. ARIFIN, S.H., M.Hum.
2.	KOORDINATOR VALIDASI DATA	JULIUS PANJAITAN, S.H., M.H.
3.	KETUA	SURUNG SIMANJUNTAK, S.H., M.Hum.
4.	SEKRETARIAT	1. H. NURSANI, S.H. 2. M. TEGUH, S.E., S.H., M.H.
5.	ANGGOTA	YURNI HENDARWATI, S.Pd
		UMI KALSUM, S.Sos.
		SYAWALUDDIN, S.H.
		ZULMAHRI, S.H.
		MANZIR, S.H.
		IRWAN HEMDI, S.H.
		M. ALI EL. FAHMI, S.T.
		RINA ASTUTI, S.E.
		LINDA NORA, S.Kom.
		FIDIYAH SISTONA, S.E.
		DONAL, S.E
		TOMMY AFRIAWAN, S.E
		NEPI ERMINENGSIH, S.E.
		AGIEF MUFTAHID, S.Kom
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	1. Dr. BAMBANG EKAPUTRA, S.H., MH. 2. SUMEDI, S.H., M.H.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



KETUA

ARIFIN

Lampiran II Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu
Nomor : 601/W8-U/SK/OT1.6/II/2026
Tanggal : 02 Februari 2026

**TUGAS TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)
PADA PENGADILAN TINGGI BENGKULU
TAHUN 2025**

NO	JABATAN	TUGAS
1	2	3
1.	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Bengkulu
2.	Koordinator Validasi Data	Memvalidasi keabsahan data kinerja.
3.	Ketua	a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan laporan kinerja sesuai dengan arah dan kebijakan yang telah ditetapkan. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan reviu atas laporan kinerja kepada Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah.
4.	Sekretaris	Mengkoordinasikan Teknis Penyusunan Laporan Kinerja
5.	Anggota	Mengukur kinerja, menyusun laporan kinerja serta menganalisis indikator kinerja pada masing-masing Bagian.
6.	Tim Pereviu Laporan Kinerja	Menelaah atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Februari 2026



KETUA

ARIFIN